

**Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan
Institusional, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan
BUMN *Go Public* di Indonesia yang Dimoderasi oleh Kebijakan
Dividen**

SKRIPSI



Oleh

TRI ANANDA RIZKY

NIM : 210502110037

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN,
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN LEVERAGE
TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN BUMN GO
PUBLIC DI INDONESIA YANG DIMODERASI OLEH
KEBIJAKAN DIVIDEN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

**Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun)**



Oleh

TRI ANANDA RIZKY

NIM : 210502110037

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan BUMN *Go Public* di Indonesia yang Dimoderasi oleh Kebijakan Dividen

SKRIPSI

Oleh

Tri Ananda Rizky

NIM : 210502110037

Telah Disetujui Pada Tanggal 13 Desember 2024

Dosen Pembimbing,



Fatmawati Zahroh, M.S.A

NIP. 198602282019032010

LEMBAR PENGESAHAN

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional,
dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan BUMN *Go
Public* di Indonesia yang Dimoderasi oleh Kebijakan Dividen

SKRIPSI

Oleh

TRI ANANDA RIZKY

NIM : 210502110037

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 23 Desember 2024

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Fajar Nurdin, M.Ak

NIP. 198310052019031006

2 Anggota Penguji

**Dr. Yona Octiani Lestari, SE., M.SA., CSRS.,
CSRA., CFA**

NIP. 197710252009012006

3 Sekretaris Penguji

Fatmawati Zahroh, M.S.A

NIP. 198602282019032010

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

SURAT PENYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Ananda Rizky

NIM : 210502110037

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

"Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan BUMN Go Public di Indonesia yang Dimoderasi oleh Kebijakan Dividen" adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari pihak lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 14 Desember 2024

Hormat saya,



METERA
TEMPEL
34C63AJX589419699

Tri Ananda Rizky

NIM: 210502110037

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan BUMN Go Public di Indonesia yang Dimoderasi oleh Kebijakan Dividen”**

Semoga ungkapan baik terus diarahkan pada pemuliaan kita terhadap Nabi Muhammad, yang telah menerangi keberadaan kita, membimbing kita dari kedalaman ketidaktahuan menuju jalan kebenaran yang tercerahkan, yang secara khusus dikenal sebagai Din al-Islam.

Komposisi skripsi ini telah dipersiapkan dengan cermat untuk memenuhi salah satu prasyarat penting untuk pencapaian gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi, dalam Program Studi Akuntansi Negara Islam Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Sepanjang fase pengembangan skripsi, penulis tidak dapat disangkal mendapat manfaat dari dukungan dan bantuan yang tak tergoyahkan dari berbagai pemangku kepentingan, yang telah memfasilitasi keberhasilan penyelesaian upaya akademik ini.

HALAMAN MOTTO

Menjadi Orang yang Bermanfaat Bagi Diri Sendiri dan Orang Lain

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan BUMN *Go Public* di Indonesia yang Dimoderasi oleh Kebijakan Dividen”** dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Keberhasilan pelaksanaan skripsi ini bergantung pada keterlibatan pemangku kepentingan terkait. Dalam konteks ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasihnya yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.El., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak, CA., M.Res., Ph.D selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Ibu Fatmawati Zahroh sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia memberikan nasihat, saran, dan waktu yang bermanfaat selama proses penyelesaian skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pengetahuan selama kuliah.
6. Kedua orang tua penulis dan keluarga yang telah memberikan semua yang mereka miliki, termasuk cinta dan kasih sayang mereka. Doa dan dukungan terus-menerus untuk membuat penulis berada di sini saat ini. Penulis ingin menjadi anak yang bangga.

7. Nisa sebagai pasangan saya, yang telah memberi dukungan dan membantu dalam pengerjaan skripsi saya
8. Teman seperjuangan akuntansi 2021 yang telah mendukung dan mendorong saya untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini tidak mencapai tingkat presisi linguistik yang optimal. Akibatnya, penulis mengantisipasi menerima kritik dan rekomendasi konstruktif untuk kemajuan penelitian di masa depan. Penulis bercita-cita bahwa tesis ini dapat menghasilkan kontribusi dan keuntungan yang signifikan dalam kemajuan pengetahuan ilmiah.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PENYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
الملخص	xviii
BAB I PENDAHULUAN	19
1.1 Latar Belakang	19
1.2 Rumusan Masalah	31
1.3 Tujuan Penelitian	32
1.4 Manfaat Penelitian	33
1.5 Batasan Penelitian	34
BAB II KAJIAN PUSTAKA	35
2.1 Penelitian Terdahulu	35
2.2 Landasan Teori	48
2.2.1 Teori Sinyal	48
2.2.2 Pajak	50
2.2.3 Profitabilitas	50
2.2.4 Ukuran Perusahaan	51
2.2.5 Kepemilikan Institusional	52
2.2.6 <i>Leverage</i>	53
2.2.7 Kebijakan Dividen	54
2.2.8 <i>Tax Avoidance</i>	55
2.2.9 Dasar Hukum Islam	56

2.3	Kerangka Konseptual	60
2.4	Hipotesis Penelitian	61
BAB III METODE PENELITIAN.....		68
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	68
3.2	Lokasi Penelitian	68
3.3	Populasi dan Sampel	68
3.4	Teknik Pengambilan Sampel	69
3.5	Data dan Jenis Data	71
3.6	Definisi Operasional Variabel.....	71
3.6.1	Varibel Dependen	71
3.6.2	Varibel Independen.....	72
3.6.3	Variabel Moderasi	75
3.7	Analisis Data	78
3.7.1	Analisis Deskriptif	79
3.7.2	Analisis Pemilihan Model.....	79
3.7.3	Uji Asumsi Klasik	81
3.7.4	Uji Hipotesis	83
3.7.5	Analisis Regresi Moderasi	84
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		88
4.1	Hasil Penelitin.....	88
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitin	88
4.1.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	89
4.1.3	Uji Pemilihan Model	93
4.1.4	Uji Asumsi Klasik	95
4.1.5	Uji Hipotesis.....	96
4.2	Pembahasan	98
4.2.1	Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance	98
4.2.2	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance	99
4.2.3	Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance	100
4.2.4	Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance.....	101

4.2.5	Pengaruh Kebijakan Dividen memoderasi Variabel Profitabilitas pada Tax Avoidance.....	102
4.2.6	Pengaruh Kebijakan Dividen memoderasi Variabel Ukuran Perusahaan pada Tax Avoidance	103
4.2.7	Pengaruh Kebijakan Dividen memoderasi Variabel Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance.....	104
4.2.8	Pengaruh Kebijakan Dividen memoderasi Variabel Leverage pada Tax Avoidance.....	105
BAB V PENUTUP		106
5.1	Kesimpulan	106
5.2	Saran	107
DAFTAR PUSTAKA		108
DAFTAR LAMPIRAN		124

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3.1 Kriteria Sampel	38
Tabel 3.2 Daftar Sempel	38
Tabel 3.3 Operasional Variabel	42
Tabel 3.4 Model Pemilihan	45
Tabel 4.1 Perusahaan Sampel Penelitian	89
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	90
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow	93
Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman	93
Tabel 4.5 Hasil Uji LM	94
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	95
Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis Regresi Linier	96
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	96
Tabel 4.9 Hasil Uji Moderated Regression Analysis	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rasio Pajak Indonesia	9
Gambar 1. Kerangka Konseptual	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Perhitungan Data

Lampiran 2 Hasil Uji Analisis Data

Lampiran 3 Biodata Penulis

Lampiran 4 Daftar Bukti Konsultasi

Lampiran 5 Keterangan Bebas Plagirisme

Lampiran 6 Lembar Pengesahan Proposal Skripsi

ABSTRAK

Tri Ananda Rizky. 2024, SKRIPSI. Judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Kepemilikan Institusional, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan BUMN *Go Public* di Indonesia yang Dimoderasi oleh Kebijakan Dividen”

Pembimbing : Fatmawati Zahroh, M.S.A

Kata Kunci : Kebijakan Dividen; Ukuran Perusahaan; Kepemilikan Institusional; *Leverage*, Profitabilitas; Penghindaran Pajak; BUMN

Penelitian ini meneliti implikasi Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan *Leverage* pada Penghindaran Pajak, dengan Kebijakan Dividen berfungsi sebagai variabel moderasi. Metodologi Investigasi ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Sampel mencakup 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 hingga 2023, dengan menggunakan pendekatan sampling purposive, yang menghasilkan total 50 pengamatan data. Teknik analitik yang digunakan adalah analisis moderasi regresi, dilakukan melalui perangkat lunak E-Views versi 12. Hasil Temuan menunjukkan bahwa Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional memberikan pengaruh positif pada Penghindaran Pajak, sedangkan Ukuran Perusahaan memiliki efek negatif, dan *Leverage* tidak menunjukkan dampak yang signifikan secara statistik, dengan Kebijakan Dividen bertindak sebagai moderator dalam hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak.

ABSTRACT

Tri Ananda Rizky. 2024, THESIS. Title “Effect of Profitability, Size Company Size, Institutional Ownership, and Leverage on Tax Avoidance in State-Owned Companies Go Public in Indonesia Moderated by Dividend Policy”

Supervisor : Fatmawati Zahroh, M.S.A

Keywords : Dividend Policy, Firm Size, Institutional Ownership, Leverage, Profitability, Tax Avoidance, SOE.

This study examines the implications of Profitability, Company Size, Institutional Ownership, and Leverage on Tax Avoidance, with Dividend Policy serving as a moderating variable. Methodology This investigation uses a quantitative research design. The sample includes 10 State-Owned Enterprises (SOEs) listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2019 to 2023, using a purposive sampling approach, resulting in a total of 50 data observations. The analytical technique used is regression moderation analysis, conducted through E-Views software version 12. The findings show that Profitability and Institutional Ownership exert a positive influence on Tax Avoidance, while Company Size has a negative effect, and Leverage shows no statistically significant impact, with Dividend Policy acting as a moderator in the relationship between leverage and tax avoidance.

المخلص

تري أناندا رزقي 2024، الأطروحة. العنوان "تأثير الربحية والملكية المؤسسية لحجم الشركة والملكية المؤسسية على في الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا التي تديرها سياسة توزيع الأرباح

المشرف: فاطمواتي زهروه، ماجستير في العلوم الاجتماعية

الكلمات المفتاحية: سياسة توزيع الأرباح، حجم الشركة، الملكية المؤسسية، الرافعة المالية، الربحية، التهرب الضريبي، الشركات المملوكة للدولة

تبحث هذه الدراسة في الآثار المترتبة على الربحية وحجم الشركة والملكية المؤسسية والرافعة المالية على التهرب الضريبي، مع استخدام سياسة توزيع الأرباح كمتغير معتدل. المنهجية يستخدم هذا البحث تصميمًا بحثيًا كميًا. وتتضمن، في الفترة من 2019 إلى 2023 (IDX) العينة 10 شركات مملوكة للدولة مدرجة في بورصة إندونيسيا للأوراق المالية باستخدام نهج أخذ العينات الانتقائي، مما ينتج عنه إجمالي 50 ملاحظة للبيانات. الأسلوب التحليلي المستخدم هو تحليل الإصدار 12. تُظهر النتائج أن الربحية والملكية المؤسسية E-Views اعتدال الانحدار الذي تم إجراؤه من خلال برنامج توتران تأثيرًا إيجابيًا على التهرب الضريبي، في حين أن حجم الشركة له تأثير سلبي، ولا تُظهر الرافعة المالية أي تأثير ذي دلالة إحصائية، مع وجود سياسة توزيع الأرباح كوسيط في العلاقة بين الرافعة المالية والتهرب الضريبي

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, pajak adalah pungutan moneter yang dikenakan pada individu atau badan oleh negara sesuai dengan kewenangan hukum, yang dikumpulkan secara eksklusif untuk kepentingan negara dan penduduknya, dan tidak mendapat imbalan dengan cara apa pun. Menurut Afridayani & Islammia (2023), pajak merupakan sarana utama yang digunakan untuk memperkaya perekonomian suatu negara, menjalankan aktivitas pemerintah, dan menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat. Jika dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya, pajak, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mencakup jumlah yang besar, sehingga pajak menjadi sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Pembangunan, infrastruktur, dan operasi pemerintah secara umum dibantu oleh pendapatan pajak yang diterima negara dari Masyarakat (Rosandi, 2022). Selain itu, agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar, sangat penting bagi wajib pajak untuk melaporkan pendapatan mereka secara akurat (Feny Destia, 2022).

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Miliar)

Penerimaan Perpajakan	2020			2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian %									
	1.404.507,50	1.285.136,30	91,5	1.444.541,60	1.547.841,10	107,15	1.783.988,00	2.034.552,40	114,05	2.021.223,70	2.154.208,20	106,58

Sumber: Nota Keuangan

Tabel sebelumnya menunjukkan bahwa rasio realisasi penerimaan pajak meningkat pada tingkat yang cukup stabil. Rasio ini turun karena beberapa alasan, termasuk penurunan harga komoditas minyak dan gas, dengan pengecualian pada tahun 2023. Menyoroti fakta bahwa target penerimaan fiskal untuk periode 2020 belum tercapai sangatlah penting. Di antara banyak penjelasan yang mungkin untuk tujuan ini adalah pandemi COVID-19 baru-baru ini. Penyebab lain yang mungkin termasuk target penerimaan pajak yang terlalu ambisius atau penggunaan celah yang disengaja oleh beberapa wajib pajak untuk menurunkan kewajiban pajak mereka. Sebuah studi menemukan bahwa wajib pajak cenderung menghindari pembayaran pajak ketika mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sistem perpajakan (Marlina, 2018).

Gambar 1.1

Rasio Pajak Indonesia Tahun 2018-2022



Sumber: Kemenkeu 2023

Antara 2018 dan 2022, rasio pajak Indonesia tetap relatif rendah. Pada 2018, rasio pajak melebihi 10 persen; Namun, pada 2019, kinerja ini menurun menjadi 9,8 persen dari PDB. Rasio penerimaan pajak semakin menurun menjadi 8,3 persen pada tahun buku 2020, bertepatan dengan timbulnya pandemi Covid-19. Selanjutnya, rasio pajak meningkat pada tahun 2021, mencapai 9,1 persen. Pada tahun fiskal 2022, rasio pajak pulih menjadi angka dua digit 10,4 persen dari PDB. Sangat penting untuk dicatat bahwa rasio pajak yang berkisar sekitar 10 persen tidak cukup untuk mengamankan pendanaan pembangunan berkelanjutan. Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya, menyarankan rasio pajak minimum 15 persen dari PDB untuk memastikan

kelangsungan pembangunan suatu negara. Rasio pajak yang rendah di Indonesia dikuatkan oleh data dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), seperti yang disajikan dalam laporan Statistik Pendapatan 2022 di Asia dan Pasifik. Laporan ini menunjukkan bahwa rasio pajak rata-rata untuk negara-negara di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2020 adalah 19 persen dari PDB, sedangkan rasio pajak rata-rata untuk negara-negara anggota OECD adalah 33,5 persen dari PDB.

Sebuah perusahaan melaksanakan kewajiban pajaknya melalui proses terstruktur yang dimulai dengan membangun sistem akuntansi dan pelaporan pajak yang akurat. Proses ini melibatkan beberapa langkah kunci, masing-masing penting untuk memastikan kepatuhan dan mengoptimalkan efisiensi pajak. Pertama Perusahaan harus mengembangkan sistem akuntansi terintegrasi yang menyediakan informasi akuntansi dan analitis yang komprehensif (Schaltegger et al., 2022). Hal ini penting untuk membuat keputusan manajerial yang terinformasi dan mencapai tujuan strategis. Akuntansi manajemen sangat penting dalam fase ini, karena mendukung proses pengambilan keputusan dan perencanaan strategis yang berkelanjutan. Kemudian Perusahaan harus menavigasi berbagai kerangka peraturan, termasuk yang terkait dengan keberlanjutan dan tanggung jawab perusahaan (Morgan, 2016). Kerangka kerja ini dapat mempengaruhi kewajiban pajak dan persyaratan pelaporan. Mengikuti peraturan ini memastikan bahwa perusahaan berkontribusi pada tujuan keberlanjutan yang lebih luas dan mematuhi standar hukum. Terakhir Pelaporan dan pengungkapan kegiatan keuangan yang akurat, termasuk pembayaran R&D, sangat penting. Namun,

pengaturan diri di beberapa wilayah dapat menyebabkan pengungkapan yang tidak lengkap, menyoroti perlunya pendekatan terpadu untuk meningkatkan transparansi. Perusahaan harus bertujuan untuk transparansi dalam pengungkapan keuangan mereka untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan akuntabilitas (Ozieranski et al., 2022).

Salah satu cara yang dilakukan oleh para wajib pajak untuk menghindari atau meminimalkan tanggung jawab pajak mereka adalah melalui pendekatan ini. Banyak orang dan perusahaan yang berusaha meminimalkan kewajiban pajak mereka dan memaksimalkan keuntungan mereka dengan melakukan strategi penghindaran pajak (Oktaviani, 2019). Perusahaan, terutama perusahaan publik yang harus membayar banyak pajak, mungkin akan mengalami penurunan laba sebagai akibat dari pajak. Sebagai bagian dari perencanaan pajak, penghindaran pajak memanfaatkan celah dalam peraturan pajak yang relevan untuk menghindari pembayaran pajak, namun tetap berada dalam batas-batas hukum mengurangi tanggung jawab pajak perusahaan (Prasatya dkk., 2020).

Selama wajib pajak bertindak dalam beberapa batas yang diizinkan oleh undang-undang, penghindaran pajak tidak ilegal (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Meskipun penghindaran pajak pada dasarnya tidak ilegal, namun tetap saja hal ini dipandang rendah oleh pihak-pihak yang berwenang di pemerintahan, sehingga menciptakan teka-teki yang aneh (Dhyपालonika, 2018). Meskipun legal, tindakan ini sering menimbulkan kontroversi karena dapat mengurangi pendapatan pajak

pemerintah, yang dapat berdampak pada program sosial dan belanja infrastruktur, serta stabilitas keuangan negara (Madjid & Akbar, 2023). Penerimaan negara diperkirakan akan berkurang akibat penghindaran pajak, namun wajib pajak melakukan suatu penghindaran pajak karena mereka percaya bahwa hal tersebut akan berdampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan mereka.

Dua Perusahaan BUMN dibidang Kesehatan pada tahun 2023 telah terjadi sebuah kasus yang berujung pada penghindaran pajak. PT Kimia Farma Tbk (KAEF) baru-baru ini mengidentifikasi pelanggaran terkait integritas data laporan keuangan di anak usahanya, PT Kimia Farma Apotek (KFA). Insiden ini memiliki konsekuensi untuk kategori pendapatan, biaya penjualan barang (HPP), dan pengeluaran operasi, sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap kerugian yang terjadi pada tahun 2023. Eskalasi aktivitas bisnis pada tahun 2023 sangat terasa di KFA. Pada tahun 2023, KAEF melaporkan kerugian bersih yang disebabkan oleh pemilik perusahaan induk sebesar Rp 1,48 triliun, sangat kontras dengan kerugian tahun sebelumnya sebesar Rp 190,4 miliar. Khususnya, penjualan bersih KAEF mengalami pertumbuhan 7,93%, mencapai Rp 9,96 triliun, dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya sebesar Rp 9,23 triliun. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) juga mengungkapkan bahwa PT Indofarma Tbk (INAF) dan anak usahanya, PT Indofarma Global Medika, terlibat dalam kegiatan yang menunjukkan perilaku penipuan.

BPK telah merekomendasikan agar Direksi INAF menginformasikan kepada pemegang saham tentang temuan komprehensif dari BPK. Selanjutnya, mereka harus

bekerja sama dengan pemegang saham dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk melaporkan masalah terkait PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya kepada lembaga penegak hukum. Selanjutnya, Direksi PT IGM diarahkan untuk melakukan hubungan dengan otoritas pajak untuk mencegah perusahaan menimbulkan kewajiban pajak penjualan sebesar Rp 18,26 miliar karena transaksi penjualan fiktif yang dikaitkan dengan Unit Bisnis FMCG. Indofarma juga mengakui ketidakmampuan untuk mencairkan gaji karyawan untuk periode Maret 2024. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, menjadi jelas bahwa INAF telah secara konsisten mengalami kerugian selama berbagai periode.

Terdapat juga Perusahaan BUMN lain yang terkena kasus pajak. Perselisihan pajak antara PGN dan DJP berkaitan dengan transaksi yang dilakukan pada tahun 2012 dan 2013. Awalnya, masalah pajak tahun 2012 menyangkut interpretasi yang berbeda mengenai peraturan perpajakan, khususnya PMK-252/PMK.011/2012 (PMK), sehubungan dengan kewajiban seputar pengumpulan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyediaan gas alam. Selanjutnya, perselisihan pada tahun 2013 berkisar pada interpretasi yang berbeda dari kerangka penagihan Perusahaan. Pada bulan Juni 1998, perusahaan mengubah harga gas menjadi denominasi US\$/mmbtu dan RP/m³, didorong oleh depresiasi Rp terhadap US \$. Sebelumnya, harga gas semata-mata dinyatakan dalam RP/m³. Namun demikian, DJP berpendapat bahwa komponen RP/m³ dari penetapan harga merupakan biaya untuk layanan distribusi yang bertanggung jawab atas PPN. Sebaliknya, Perseroan menegaskan bahwa harga dalam

US \$/mmbtu dan RP/m³ merupakan satuan tunggal harga gas yang dibebaskan dari PPN.

Strategi pajak perusahaan dapat bervariasi, terutama perusahaan-perusahaan yang memiliki saham mayoritas di negara bagian atau federal. Menurut Le et al.,(2022) perusahaan-perusahaan milik negara memiliki banyak masalah keagenan. Pemegang saham umum mungkin memiliki konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan, sementara pemegang saham minoritas mungkin memiliki konflik kepentingan dengan negara, yang memiliki saham mayoritas di perusahaan. Perbedaan pajak buku sebesar 3% hingga 5% lebih rendah biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan milik negara. Dalam hal keterlibatan manajerial, 27% perusahaan manufaktur di Indonesia dikelola oleh komisaris atau dewan direksi yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah (Rustiarini & Sudiartana, 2021). Perusahaan dengan konsentrasi pejabat pemerintah yang tinggi terlibat dalam strategi penghindaran pajak yang lebih aktif, menunjukkan bahwa karakteristik tata kelola berdampak pada tingkat penghindaran pajak bahkan pada perusahaan milik negara.

Bisnis di Indonesia dianggap sebagai badan usaha milik negara (BUMN) jika pemerintah memiliki mayoritas atau seluruh sahamnya, seperti yang dinyatakan dalam UU No. 19 tahun 2003. Menurut (BPS, 2023), ada 77 perusahaan milik negara (BUMN) di Indonesia hingga tahun 2022. Karena banyak BUMN yang dibubarkan pada tahun 2019, jumlah total BUMN turun secara signifikan menjadi 117 BUMN. Tiga belas dari tujuh puluh tujuh BUMN yang ada saat ini telah diperdagangkan di

Bursa Efek Indonesia. Karena pemerintah memiliki sebagian besar perusahaan, penghindaran pajak adalah ide yang buruk. Baik pajak maupun laba diterima oleh negara dari perusahaan-perusahaan BUMN. Kas negara akan menjadi lebih ringan karena penghindaran pajak oleh pemilik mayoritas. Namun demikian, jika manajemen menahan diri untuk tidak melakukan perencanaan pajak yang sesuai hukum, distribusi kekayaan kepada pemegang saham lain (non-negara) akan menjadi tidak optimal. Studi yang membandingkan perusahaan swasta dengan BUMN masih dalam tahap permulaan, dan sebagian besar kajian penelitian yang ada berfokus pada strategi penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan secara umum atau dalam konteks yang sempit. Hal ini terutama terjadi di Indonesia.

Beban pajak tumbuh secara proporsional dengan profitabilitas perusahaan, sehingga masuk akal jika hal ini merupakan salah satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi strategi penghindaran pajak. Perusahaan yang mampu menghasilkan rasio profitabilitas yang tinggi lebih mungkin untuk berterus terang tentang tanggung jawab pajak mereka, karena rasio ini menunjukkan potensi perusahaan untuk menghasilkan laba (Arinda & Dwimulyani, 2018). Tetapi berdasarkan (Wulandari dkk., 2023) Profitabilitas berfungsi sebagai indikator kemandirian keuangan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Semua perusahaan bercita-cita untuk mencapai keuntungan besar, karena peningkatan profitabilitas menandakan kinerja organisasi yang terpuji. Perusahaan biasanya menahan diri dari terlibat dalam strategi penghindaran pajak, karena tindakan seperti itu akan memerlukan pengurangan

keuntungan secara artifisial sebelum perpajakan. Skala bisnis adalah elemen kedua. Ukuran perusahaan mempengaruhi kepemilikan asetnya karena aset-aset ini menentukan sejauh mana perusahaan dapat menghindari pajak. Akibatnya, aset yang lebih besar menghasilkan beban pajak yang lebih tinggi, dan aset yang lebih besar sering kali mengarah pada strategi penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan (Riskatari & Jati, 2020). Agregat aset yang lebih tinggi dalam suatu perusahaan menunjukkan kinerja yang kuat; organisasi yang diklasifikasikan sebagai skala besar biasanya memiliki sumber daya yang diperlukan untuk terlibat dalam strategi manajemen pajak yang lebih komprehensif daripada rekan-rekan mereka yang lebih kecil (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Kepemilikan institusional adalah pertimbangan ketiga. Kepemilikan institusional mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi jika eksekutif puncak perusahaan, yang juga merupakan pemilik terbesar perusahaan, menyalahgunakan posisi otoritas mereka (V. R. Putri & Putra, 2017). Namun kepemilikan institusional sering menahan diri dari pengawasan langsung tata kelola perusahaan, karena pemegang saham ini biasanya bergantung pada manajemen untuk mengoptimalkan operasi, memprioritaskan maksimalisasi dividen daripada peningkatan laba strategis atau minimalisasi pajak (Sudiarto dkk., 2022). Variabel lainnya *Leverage* yang meningkat dapat menyebabkan peningkatan biaya bunga dan penurunan pendapatan bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus terlibat dalam strategi mitigasi pajak (Faradilla & Bhilawa, 2022). Hal Berbeda dengan (Nibras & Hadinata, 2020) yang menyatakan Rasio eskalasi kewajiban, secara keseluruhan, tidak secara akurat mewakili peningkatan pengeluaran bunga perusahaan.

Selain itu, pembiayaan yang bersumber dari lembaga perbankan relatif lebih tinggi mengenai kewajiban jangka pendek daripada kewajiban jangka panjang, sehingga memperkuat kewajiban bunga yang dipikul oleh perusahaan kecil. Sejalan dengan Wahyuni & Andriani, (2024) bahwa leverage berbanding terbalik mempengaruhi agresivitas pajak, dengan perusahaan yang memiliki utang lebih besar umumnya menghindari taktik semacam itu.

Dengan meneliti perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia melalui lensa kinerja keuangan, penghindaran pajak, dan kebijakan dividen, penelitian ini memberikan perspektif baru. Penelitian ini memiliki potensi untuk menjelaskan bagaimana kebijakan dividen memoderasi hubungan antara kinerja keuangan yang kuat dan metode penghindaran pajak. Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan pencerahan mengenai kebijakan dividen dengan meneliti perusahaan-perusahaan BUMN. Diyakini oleh Kuswanto (2023) bahwa perusahaan milik negara (BUMN) lebih mungkin dibandingkan perusahaan non-BUMN untuk menerapkan kebijakan dividen yang menguntungkan pemegang saham. Dengan cara yang bermakna secara statistik, kebijakan dividen dipengaruhi oleh tarif pajak efektif. Fakta bahwa ETR mengurangi DY untuk BUMN mengimplikasikan bahwa peningkatan pajak dan pendapatan dividen harus menjadi fokus utama. Penelitian ini menyoroti pengambilan keputusan dan perilaku keputusan dan tindakan BUMN di Indonesia dan menekankan pentingnya peran mereka sebagai penghasil pendapatan utama bagi negara. Apsari & Setiawan (2018) menemukan bahwa kebijakan dividen memitigasi dampak merugikan

dari pemotongan pajak terhadap nilai perusahaan. Korelasi negatif antara pemotongan pajak dan nilai perusahaan dimitigasi ketika dividen dibayarkan kepada investor, karena dividen meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Dengan melihat lebih dari sekadar kesuksesan perusahaan di masa lalu dan potensinya di masa depan, para pemegang saham dapat mengambil manfaat dari temuan-temuan penelitian yang disebutkan di atas ketika membuat pilihan investasi. Menurut penelitian yang dilakukan pada saat itu (Maryanti & Ayem, 2022) bisnis dengan laba yang signifikan diharuskan membayar pajak. Beberapa bisnis tidak akan menghindari pajak jika hal itu dapat merugikan investor mereka, terutama jika jumlah yang harus dibayarkan cukup besar. Selain itu, beberapa bisnis bertujuan untuk menginvestasikan kembali keuntungan mereka dalam pertumbuhan daripada membayar dividen ketika mereka memiliki banyak uang.

Perusahaan yang dimiliki oleh negara diharuskan melakukan penghindaran pajak karena sejumlah alasan. Agar tetap kompetitif, perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) sering kali menurunkan pajak mereka sebagai tanggapan atas pemotongan pajak yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan swasta dalam skala nasional dan internasional. Diyakini bahwa keuntungan perusahaan di masa depan akan meningkat sebagai hasil dari investasi yang dilakukan dengan uang yang tidak digunakan untuk membayar pajak, seperti pabrik baru, teknologi, atau pengembangan produk. Ketiga, beban pajak yang berlebihan. Perusahaan mungkin akan ragu untuk tumbuh dan menambah lapangan pekerjaan jika pajak terlalu tinggi.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai elemen-elemen yang disebutkan di atas menghasilkan kesimpulan yang saling bertentangan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak dari kebijakan dividen terhadap korelasi antara penghindaran pajak dan profitabilitas. Dampak profitabilitas BUMN terhadap metode penghindaran pajak, yang dipengaruhi oleh kebijakan dividen, akan lebih dipahami sebagai hasil dari penelitian ini.

kebijakan dividen pada perusahaan-perusahaan BUMN. Manajer perusahaan, investor, regulator, dan pihak-pihak lain akan mendapatkan manfaat dari hasil penelitian ini karena hasil penelitian ini akan menjelaskan elemen-elemen yang mempengaruhi strategi bisnis yang berhubungan dengan pajak dan konsekuensi dari strategi tersebut terhadap kinerja perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap implementasi *Tax Avoidance* ?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap implementasi *Tax Avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap implementasi *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap implementasi *Tax Avoidance*
5. Apakah kebijakan dividen memoderasi pengaruh variable Profitabilitas terhadap implementasi *Tax Avoidance*?

6. Apakah kebijakan dividen memoderasi pengaruh variable ukuran perusahaan terhadap implementasi *Tax Avoidance*?
7. Apakah kebijakan dividen memoderasi pengaruh variable kepemilikan institusional terhadap implementasi *Tax Avoidance*?
8. Apakah kebijakan dividen memoderasi pengaruh variable *Leverage* terhadap implementasi *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel profitabilitas terhadap praktik *Tax Avoidance*
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel ukuran perusahaan terhadap praktik *Tax Avoidance*
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel kepemilikan institusional terhadap praktik *Tax Avoidance*
4. Untuk mengetahui pengaruh variabel *Leverage* terhadap praktik *Tax Avoidance*
5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional memoderasi variabel profitabilitas terhadap praktik *Tax Avoidance*
6. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen memoderasi variabel ukuran perusahaan terhadap praktik *Tax Avoidance*

7. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen memoderasi variabel kepemilikan institusional terhadap praktik *Tax Avoidance*
8. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen memoderasi variabel *Leverage* terhadap praktik *Tax Avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pemahaman peneliti mengenai pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan mempertimbangkan efek moderasi kebijakan dividen pada perusahaan BUMN.
2. Bagi akademisi, untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai penghindaran pajak dan elemen-elemen penyusunnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi cetak biru bagi pengembangan penelitian sejenis di masa yang akan datang.
3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang cara-cara di mana strategi penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh perusahaan, dengan penekanan khusus pada efek moderasi dari intensitas aset tetap. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan mengurangi sejauh mana organisasi terlibat dalam strategi perencanaan pajak ilegal.

1.5 Batasan Penelitian

Tujuan dari batasan penelitian ini adalah untuk menjaga agar pembahasan tetap terbatas pada area yang tercakup dalam topik yang telah diidentifikasi dan untuk menjaga agar penelitian tetap terfokus pada area tersebut. Salah satu batasan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini hanya menggunakan data dari bisnis BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 hingga 2023.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penghindaran pajak menjadi perhatian banyak peneliti. Penelitian terdahulu akan diperbaharui oleh penelitian baru ini. Untuk memudahkan dalam membangun kerangka pemikiran dalam penelitian ini, penelitian terdahulu dapat menjadi referensi untuk mendapatkan wawasan mengenai subjek penelitian yang dimaksud. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel, dan Indikator	Metode dan Analisis Data	Hasil
-----------	--	------------------------------------	---	--------------

1.	Erianto & Fardinal, 2024 “The Effect of Income Smoothing and Dividend Policy on <i>Tax Avoidance</i> in Indonesia”	X1 : Income smoothing X2 : kebijakan dividen Y : penghindaran pajak	Metode analisis regresi linier berganda	Kombinasi kebijakan dividen dan perataan laba memiliki efek dampak terhadap strategi penghindaran pajak.
----	---	---	---	--

2.	Kuswanto, 2023, “ <i>Tax Avoidance and Dividend Policy: Evidence from Indonesian State-Owned Enterprises</i> ”	X1 : kebijakan dividen Y : penghindaran pajak Z : Perusahaan BUMN	Moderated Regression Analysis (MRA)	Kebijakan dividen BUMN lebih cenderung menguntungkan pemegang saham dibandingkan dengan perusahaan non-BUMN. Tujuan untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak dan dividen ditunjukkan oleh fakta bahwa, untuk BUMN, ETR memiliki pengaruh negatif terhadap DY, meskipun tarif pajak efektif memiliki pengaruh yang signifikan secara
----	--	---	-------------------------------------	--

				statistik terhadap kebijakan dividen.
3.	Arinda & Dwimulyani, 2018, “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Kualitas Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi”	X1 : profitabilitas X2 : <i>Leverage</i> X3 : Sales Growth X4 : Kualitas Audit Y : penghindaran pajak Z : GCG	: Multiple regression analysis	Profitabilitas suatu entitas memberikan pengaruh konstruktif pada penghindaran pajak, sedangkan <i>Leverage</i> menunjukkan dampak yang merugikan pada penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan yang efektif memiliki kapasitas untuk mengurangi hubungan konstruktif antara profitabilitas dan penghindaran pajak.
4.	Ngadiman & Puspitasari, 2017, “Pengaruh	X1 : <i>Leverage</i> X2 : kepemilikan	: Regresi Linier	Konsep <i>Leverage</i> tidak memberikan pengaruh yang cukup

	<i>Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012”</i>	institusional X3 : Ukuran Perusahaan X4 : Profitabilitas Y : <i>Tax Avoidance</i>	Berganda	besar pada penghindaran pajak. Sebaliknya, faktor-faktor kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan menunjukkan dampak besar pada penghindaran pajak.
5.	Prasetya dkk., 2020, “Karakter Eksekutif, Profitabilitas,	X1 : karakter eksekutif X2 : profitabilitas	Moderated Regression Analysis	Ciri-ciri eksekutif berdampak pada penghindaran pajak, sedangkan kehadiran

	<p><i>Leverage</i>, dan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi</p>	<p>X3 : <i>Leverage</i> X4 : Komisaris Independen Y : penghindaran pajak Z : kepemilikan institusional</p>		<p>komisaris independen tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Selain itu, <i>Leverage</i> berperan dalam penghindaran pajak. Kepemilikan institusional dapat meningkatkan efek moderasi antara sifat eksekutif dan penghindaran pajak, sedangkan hal itu dapat mengurangi hubungan moderasi antara profitabilitas dan <i>Leverage</i> terkait penghindaran pajak.</p>
6.	<p>Rahmadini & Ariani, 2019, "Pengaruh</p>	<p>X1 : profitabilitas X2 : <i>Leverage</i></p>	<p>Analisis data regresi linier</p>	<p>Dimensi profitabilitas, <i>Leverage</i>, kepemilikan manajerial, kehadiran</p>

	Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dan Corporate Governance Terhadap Perencanaan Pajak”	X3 : GCG Y : perencanaan pajak		komisaris independen, dan pembentukan komite audit menunjukkan pengaruh yang cukup besar pada strategi perencanaan pajak. Sebaliknya, kepemilikan kelembagaan tidak menunjukkan efek signifikan secara statistik pada perencanaan pajak.
7.	Apsari & Setiawan, 2018, “Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> terhadap Nilai Perusahaan dengan	X1 : <i>Tax Avoidance</i> Y : Nilai Perusahaan Z : Kebijakan dividen	Moderated Regression Analysis (MRA)	ETR meningkatkan nilai perusahaan. Mengurangi dampak negatif penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dapat dilakukan melalui

	Kebijakan Dividen sebagai Variabel Moderasi”			kebijakan dividen yang telah disebutkan dalam makalah ini.
8.	Riskatari & Jati, 2020, “Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan pada <i>Tax Avoidance</i> ”	X1 : profitabilitas X2 : <i>Leverage</i> X3 : ukuran perusahaan Y : penghindaran pajak	Analisis regresi linier berganda.	Ada korelasi langsung antara ukuran perusahaan dan strategi penghindaran pajaknya, sementara korelasi terbalik diamati antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Selain itu, korelasi positif dicatat antara <i>Leverage</i> dan penghindaran pajak.
9.	Hendayana dkk., 2024, “Exploring impact of	X1 : profitabilitas X2 : <i>Leverage</i> X3 : intensitas	Kuantitatif, Moderated Regression Analysis	Profitabilitas dan leverage secara signifikan mempengaruhi

	profitability, <i>Leverage</i> and capital intensity on avoidance of tax, moderated by size of firm in LQ45 companies ”	modal Z : ukuran perusahaan Y : penghindaran pajak	(MRA)	penghindaran pajak, sementara intensitas modal tidak menunjukkan dampak. Selain itu, ukuran perusahaan memperkuat efek profitabilitas dan leverage, namun mengurangi pengaruh intensitas modal pada penghindaran pajak.
10.	Anderson et al., 2022, “Corporate Dividend Policy and <i>Tax Avoidance</i> “	X1 : kebijakan dividen Y : penghindaran pajak	Analisis regresi linier berganda	Bagaimana surplus didistribusikan di antara para pemegang saham, manajer, dan otoritas pajak dipengaruhi oleh kebijakan dividen.
11.	Suryatna, 2023, “The Effect of	X1 : kepemilikan	Analisis regresi	Kepemilikan institusional dan

	Institutional Ownership, Sales Growth, Firm Size on <i>Tax Avoidance</i> with Corporate Social Responsibility as a Moderating Variable”	institusional X2 ; ukuran perusahaan X3 : pertumbuhan penjualan Z : tanggung jawab sosial Y : penghindaran pajak	linier berganda	ukuran organisasi memberikan pengaruh yang menguntungkan pada penghindaran pajak; sebaliknya, pertumbuhan penjualan berdampak buruk pada penghindaran pajak. Penyebaran informasi tanggung jawab sosial perusahaan dapat berfungsi untuk memoderasi dan mengurangi dampak pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
12.	Friskila & Jaeni, 2022, “The Effect of	X1 : profitabilitas X2 : <i>Leverage</i>	Analisis regresi linier	Hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak

	<p>Profitability and <i>Leverage on Tax Avoidance</i> with Corporate Social Responsibility (CSR) as a Mediator Variable”</p>	<p>Y : penghindaran pajak Z : CSR</p>	<p>berganda</p>	<p>berkorelasi terbalik, sedangkan <i>Leverage</i> memberikan pengaruh positif pada penghindaran pajak. Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan secara positif terkait dengan penghindaran pajak. Temuan analisis mediasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak berfungsi sebagai mediator antara profitabilitas dan <i>Leverage</i> dalam kaitannya dengan</p>
--	--	---	-----------------	--

				penghindaran pajak.
13.	Sari dkk., 2022, “Return on Assets (ROA), <i>Leverage</i> , And Firm Size on <i>Tax Avoidance</i> (Registered Banking Companies on IDX 2014-2018)”	X1 : profitabilitas X2 : <i>Leverage</i> X3 : ukuran perusahaan Y : penghindaran pajak	: Multiple linear regression	Pengembalian sebagian aset (ROA) menunjukkan dampak terbalik yang signifikan pada penghindaran pajak, sementara <i>Leverage</i> parSIAL tidak menunjukkan efek penting dan juga berkorelasi negatif dengan penghindaran pajak. Selain itu, sebagian ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh substantial dan terkait negatif dengan penghindaran pajak. Sebaliknya,

				ROA, <i>Leverage</i> , dan ukuran perusahaan secara kolektif menunjukkan hubungan yang signifikan dan positif dengan penghindaran pajak.
14.	Mailia, 2020, Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	X1 : profitabilitas X2 : ukuran perusahaan X3 : capital intensity Y : penghindaran pajak	: Uji regresi linear berganda	Dalam hal penghindaran pajak, profitabilitas tidak relevan. Meskipun penghindaran pajak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan dan intensitas modal.
15.	Sutomo & Djaddang, 2017, "Determinan	X1 : profitabilitas X2 : <i>Leverage</i>	: Analisis linier berganda	Faktor-faktor profitabilitas, intensitas modal, dan

	<i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Manufaktur di Indonesia”	X3 : capital intensity X4 : inventory intensity Y : penghindaran pajak		intensitas persediaan berfungsi sebagai penentu penghindaran pajak, sedangkan <i>Leverage</i> dan likuiditas tidak menunjukkan pengaruh substansial pada penghindaran pajak.
--	---	--	--	---

Sejumlah penelitian telah meneliti dampak dari faktor moneter dan non-moneter terhadap transparansi pengajuan pajak perusahaan. Sejauh mana perusahaan merencanakan pajak mereka dapat dipahami dengan lebih baik dengan menggali lebih jauh ke dalam data terbaru untuk perusahaan-perusahaan milik negara yang menggunakan kebijakan dividen sebagai elemen moderasi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Sinyal

Teori Sinyal awalnya disusun pada tahun 1973. Menurut Michael Spence, (1973), teori sinyal mewujudkan asimetri informasi yang memotivasi perusahaan untuk memberikan pengungkapan laporan

keuangan kepada pihak eksternal, yaitu investor, yang bertindak sebagai penerima sinyal. Kesejahteraan pemegang saham akan terpengaruh secara positif oleh dividen yang besar. Perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan dari masuknya calon investor baru yang menarik (Maryanti & Ayem, 2022). Menurut Hartono, (2013) Perusahaan biasanya menghindari pengurangan dividen karena implikasi negatif yang disampaikan tindakan tersebut terkait likuiditas mereka, karena pemotongan sering ditafsirkan sebagai tanda kesulitan keuangan, yang mengarahkan perusahaan untuk mempertahankan pembayaran dividen yang konsisten untuk menunjukkan stabilitas. Korelasi antara kebijakan dividen dan penghindaran pajak jelas ditunjukkan dalam banyak studi empiris, namun, implikasi teori pensinyalan memperkenalkan lapisan kerumitan tambahan.

Deklarasi dividen memiliki kapasitas untuk mengkomunikasikan stabilitas keuangan perusahaan ke pasar, sehingga mengurangi asimetri informasi yang ada antara pemangku kepentingan internal dan pengamat eksternal. Fenomena ini didasarkan pada teori pensinyalan, yang menyatakan bahwa dividen berfungsi sebagai saluran informasi mengenai kapasitas pendapatan prospektif Perusahaan (Taleb, 2019). Perusahaan yang mendistribusikan pembayaran dividen tinggi sering mengambil bagian dalam strategi penghindaran pajak

untuk menambah cadangan kas mereka, yang penting untuk mempertahankan tingkat dividen tanpa membahayakan persyaratan operasional (Anderson et al., 2022). Fenomena penghindaran pajak dapat terutama ditekankan pada perusahaan yang ditandai dengan *Leverage* keuangan yang substansif dan arus kas masuk operasional yang minimal, karena entitas tersebut memiliki kebutuhan yang meningkat untuk mengelola sumber daya kas mereka dengan baik.

2.2.2 Pajak

Pajak merupakan pengenaan keuangan wajib yang diberlakukan oleh negara, yang diharuskan untuk dikirimkan oleh individu atau organisasi sesuai dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan (KUP). Iuran ini digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tidak mendapat imbalan secara langsung. tanggung jawab keuangan yang seharusnya disetorkan kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi tidak dilakukan. Pengeluaran publik dan pencapaian tujuan ekonomi, sosial, dan politik nasional keduanya didukung oleh pendapatan (Aulia & Purwasih, 2022).

2.2.3 Profitabilitas

Profitabilitas mengacu pada kapasitas perusahaan untuk

menghasilkan uang. Persentase profitabilitas adalah indikator yang baik untuk kapasitas perusahaan untuk mencapai tingkat pendapatan yang memuaskan. Margin laba yang lebih besar dapat menjadi indikasi kinerja keuangan yang kuat, yang pada gilirannya dapat menarik investor untuk menaruh uang ke dalam perusahaan, yang mengarah ke kenaikan harga saham dan nilai keseluruhan (D. Dewi & Sudiartha, 2017). Kemampuan perusahaan untuk mengubah aset dan ekuitasnya menjadi laba yang memadai dapat dinilai dengan menggunakan ukuran profitabilitas (Leksono dkk., 2019).

Profitabilitas merupakan indikator kinerja utama dan ukuran profitabilitas masa depan dalam analisis keuangan (Nurdin & Abdani, 2020). Tujuan dari setiap bisnis adalah untuk memaksimalkan laba, dan merupakan tugas dari manajemen puncak untuk melakukan segala cara untuk mewujudkannya (Nawang Sari, 2022). Perusahaan biasanya melakukan penghindaran pajak ketika beban pajak meningkat. Alasan sederhananya, rasio laba atas aset (ROA) yang lebih tinggi secara langsung berkorelasi dengan laba yang lebih besar untuk bisnis (Ariawan & Setiawan, 2017).

2.2.4 Ukuran Perusahaan

Pendapatan, total aset, dan total ekuitas adalah tiga metrik yang mengklasifikasikan ukuran perusahaan (Herawati & Jaeni, 2024). Salah

satu instrumen yang berguna dalam analisis keuangan dan bisnis adalah ukuran perusahaan, yang berdampak pada beberapa area strategis dan operasional. Organisasi dapat memanfaatkan celah pajak dengan lebih mudah seiring dengan bertambahnya ukuran karena lebih banyak transaksi yang terjadi pada organisasi yang lebih besar (Saputro, 2021). Ukuran perusahaan yang mengungkapkan seluruh aset dan pendapatannya menjadi salah satu indikator elemen yang berdampak pada upaya penghindaran pajak (Rahmawati dkk., 2021).

Ukuran perusahaan merupakan indikasi dari stabilitas dan kemampuan perusahaan (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Karena adanya korelasi antara ukuran perusahaan dan jumlah sumber daya yang dimilikinya, maka masuk akal jika perusahaan yang lebih besar lebih cenderung melakukan strategi penghindaran pajak (Irawan dkk., 2017). Perusahaan dengan aset yang besar biasanya menjadi pusat perhatian. Karena kompleksitas transaksi perusahaan tumbuh seiring dengan ukurannya, terdapat peluang bagi negara suaka pajak untuk menghindari pajak atas setiap transaksi tersebut (Meidiawati, 2016).

2.2.5 Kepemilikan Institusional

Ketika institusi memiliki sebuah perusahaan, hal ini menunjukkan tata kelola perusahaan yang baik (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Kepemilikan institusional mengacu pada persentase

saham perusahaan yang dipegang oleh entitas seperti trust, lembaga pemerintah, dan investor asing. Hal ini menunjukkan tingkat keterlibatan investor institusional dalam kepemilikan saham perusahaan (Ristanti, 2022). Beban pajak perusahaan sebanding dengan jumlah pemegang saham yang dimilikinya. Ketika pemegang saham dapat mengurangi tagihan pajak mereka, mereka memberikan tekanan kepada manajemen untuk memprioritaskan kinerja keuangan daripada keuntungan pribadi (A. A. Putri, 2019).

2.2.6 *Leverage*

Leverage, sebagaimana diartikulasikan dalam 169/PMK. 010/2015, berkaitan dengan metodologi keuangan dan operasional yang mempengaruhi kinerja dan penilaian perusahaan, memungkinkan perusahaan untuk mengubah nilai buku aset, sehingga berdampak pada rasio utang terhadap ekuitas dan *Leverage* keuangan yang komprehensif. *Leverage* merupakan metrik keuangan yang mengukur sejauh mana suatu organisasi dibiayai melalui hutang. Evaluasi metrik ini menggunakan proporsi total utang relatif terhadap struktur modal organisasi, yang umumnya disebut sebagai Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER). Menurut Faradilla & Bhilawa, (2022) Pemanfaatan *Leverage* memberikan pengaruh yang menguntungkan pada strategi minimalisasi pajak. Telah ditentukan

bahwa peningkatan *Leverage* dapat menyebabkan peningkatan pengeluaran bunga dan penurunan pendapatan bagi organisasi.

2.2.7 Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen mengacu pada keputusan yang diambil oleh tim manajemen keuangan perusahaan tentang distribusi atau penahanan laba. Penurunan sumber dana internal perusahaan akan berakibat pada laba ditahan yang lebih kecil jika preferensinya adalah pembagian dividen yang lebih besar (Erianto & Fardinal, 2024). Dividen berfungsi sebagai mekanisme untuk manajemen pajak dan penyebaran informasi di antara pelaku pasar; Namun, kemanjuran teori pensinyalan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor penentu seperti kerangka tata kelola perusahaan dan kondisi pasar yang ada, yang dapat memperkuat atau melemahkan dampak penghindaran pajak pada kebijakan dividen. (Hartono, 2013).

Untuk mengalokasikan sebagian dari keuntungan mereka kepada pemegang saham sesuai dengan porsi kepemilikan mereka, perusahaan dapat menetapkan kebijakan dividen (Saragih & Rusdi, 2022). Kebijakan dividen dapat menimbulkan masalah bagi prinsipal dan agen (Apsari & Setiawan, 2018). Hal ini disebabkan karena kebutuhan mereka berbeda. Jika pemegang saham mendapatkan keuntungan dari penghindaran pajak, kekayaan mereka akan tumbuh seiring dengan valuasi perusahaan dan harga saham, yang mengarah pada pembayaran dividen yang lebih tinggi

dan kesejahteraan investor secara keseluruhan (Maryanti & Ayem, 2022)..

2.2.8 *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak adalah strategi yang sah untuk menghindari pembayaran pajak yang tidak melanggar aturan apa pun. (Baker, 2021) Pengurangan pajak mengacu pada upaya yang sah untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan sepenuhnya ketentuan pajak. Karena strategi penghindaran pajak lebih rentan untuk mengeksploitasi celah hukum yang mempengaruhi pendapatan pajak bagi negara, maka diyakini bahwa strategi ini tidak melanggar larangan yang berkaitan dengan undang-undang perpajakan (Handayani, 2018).

Menurut Rahmadini & Ariani (2019), penghindaran pajak terjadi ketika sebuah bisnis secara aktif mencari cara untuk menyusun transaksi keuangannya dengan cara meminimalkan atau menghilangkan kewajibannya. Dengan memanfaatkan celah hukum dan kelemahan dalam ketentuan perpajakan suatu negara, praktik penghindaran pajak mencoba untuk menurunkan beban pajak yang disetujui secara resmi tanpa menarik perhatian dari para ahli pajak (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Diperlukan biaya untuk melakukan strategi penghindaran pajak. Mengambil risiko jika tindakan tersebut diketahui adalah bagian dari hal ini, begitu juga dengan menginvestasikan waktu dan energi untuk menerapkan cara-cara

menghindari pajak. Risiko-risiko ini dapat muncul secara terang-terangan, seperti bunga dan denda, atau secara terselubung, seperti potensi kerusakan reputasi perusahaan, yang dapat membahayakan kelangsungan hidup jangka panjangnya (Sholikhah & Nurdin, 2022). Untuk merekonsiliasi laba akuntansi dengan laba pajak, perusahaan harus menyelaraskan laporan fiskal dengan laporan keuangan bisnisnya. Perusahaan melaksanakan penyelarasan ini melalui proses penyesuaian atau rekonsiliasi, menggunakan rumus Book Tax Difference (BTD)(Windarti & Sina, 2017).

2.2.9 Dasar Hukum Islam

Prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk tata kelola di sektor perusahaan dan publik, memfasilitasi manajemen keuangan yang etis dan efektif sambil menumbuhkan kepercayaan pemangku kepentingan; makalah ini meneliti sifat beragam prinsip-prinsip ini dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Transparansi ditandai sebagai tindakan penyebaran informasi yang akurat kepada publik mengenai status fiskal aktual, mengingat masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi tersebut dengan cara yang jelas dan memiliki hak prerogatif untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya APBN

yang telah dialokasikan untuknya, serta untuk menetapkan kerangka hukum untuk menopang tanggung jawab ini. Firman Allah selanjutnya berkaitan dengan konsep transparansi, khususnya dalam konteks QS. An-Nisa Ayat 58, yang menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Mengenai referensi QS, An-Nisa Ayat 58 menjelaskan dengan jelas bahwa Ilahi telah mengamanatkan transmisi arahan kepada individu-individu yang berhak menerima mandat tersebut, karena Yang Ilahi Maha Mendengar dan Maha Melihat.

Kemudian akuntabilitas publik melibatkan kewajiban individu dalam posisi kepemimpinan untuk bertanggung jawab atas, berkomunikasi, dan mengungkapkan semua kegiatan kepada entitas yang memiliki kepercayaan dan wewenang untuk mengawasi tanggung jawab tersebut dalam manajemen. Hal ini dicontohkan dalam konteks akuntabilitas seperti yang tercermin dalam QS. Al-Mujadah ayat 11, yang mengartikulasikan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Mengenai referensi QS, Al-Mujah diidentifikasi sebagai ayat 11, yang mengartikulasikan konsep akuntabilitas. Secara khusus, jika seseorang memiliki pengetahuan dalam konteks ini dan memahami prinsip akuntabilitas secara efektif, kemudian menerapkannya dengan mahir dalam upaya mereka, maka Tuhan akan mengangkat status mereka. Peningkatan ini berkaitan dengan mereka yang setia dan berpengetahuan, karena Tuhan sangat teliti dalam meneliti semua tindakan yang dilakukan oleh hamba-Nya.

Akuntansi mempunyai kaitan erat dengan pajak. Pajak sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad, meskipun pada awalnya pajak dibebankan kepada non-Muslim untuk memastikan mereka aman dan bahagia di bawah kekuasaan Islam. Namun pada akhirnya, umat Islam dikenakan pajak yang sama dengan non-Muslim. Jika keuangan baitul mal tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan negara, seperti perang atau kebutuhan lainnya, maka diperbolehkan untuk membebankan pajak tambahan kepada masyarakat selain zakat, menurut Imam Al-Ghazali. Namun hal ini tidak diperbolehkan jika uang baitul mal masih ada.

Sehubungan dengan tanah Irak yang telah direbut, negara pertama kali memberlakukan kharaj di bawah pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khatab, sesuai dengan ijtihadnya, yang telah diterima oleh

para Sahabat lainnya. Tampaknya zakat dan pajak sudah ada bahkan pada masa-masa awal Islam. Atas saran dari pelayannya, hal ini terjadi tepat setelah tentara Muslim baru saja menaklukkan Irak. Harta rampasan perang, termasuk wilayah yang diperoleh, tidak boleh dibagi-bagi, menurut Khalifah Umar. Penduduk desa telah merampas tanah tersebut, tetapi tentara yang memilikinya. Dengan demikian, pajak yang dikenal sebagai 'kharaj' dibebankan kepada seluruh penduduk Irak, tanpa memandang afiliasi agama mereka. Di sini, umat Islam mulai membayar pajak selain zakat (Haskar, 2020).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S At-Tawba:103).

Sebaliknya, orang-orang beriman diperintahkan oleh Nabi dan Allah SWT untuk membayar zakat dalam rangka mengantisipasi keridhaan-Nya. Di sisi lain, pajak negara adalah fungsi dari undang-undang yang harus dipatuhi oleh individu (Zahroh & Harkaneri, 2020). Pajak dan zakat sama-sama bertujuan untuk meningkatkan standar

hidup masyarakat. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, jenis pungutan baru, yang secara kolektif dikenal sebagai pajak (dharibah), berevolusi untuk menutupi berbagai macam biaya.

Negara membutuhkan sumber pendapatan baru untuk membiayai berbagai hal seperti pengeluaran militer dan pengentasan kemiskinan, dan pajak merupakan pilihan utama yang lebih baik daripada zakat dan sedekah. Sedekah dan zakat tidak cukup untuk menutupi biaya-biaya ini. “Oleh karena itu, distribusikan pajak kepada semua orang secara adil dan setara, perlakukan semua orang secara sama, jangan memberikan kekayaan, dan jangan mengecualikan siapa pun, bahkan pejabat Anda atau teman dekat Anda sendiri atau orang-orang di sekitar kita,” kata Ibnu Khaldun dalam bukunya, *Muqaddimah*, menekankan bahwa tidak seorang pun boleh dikenai pajak melebihi kemampuan mereka.

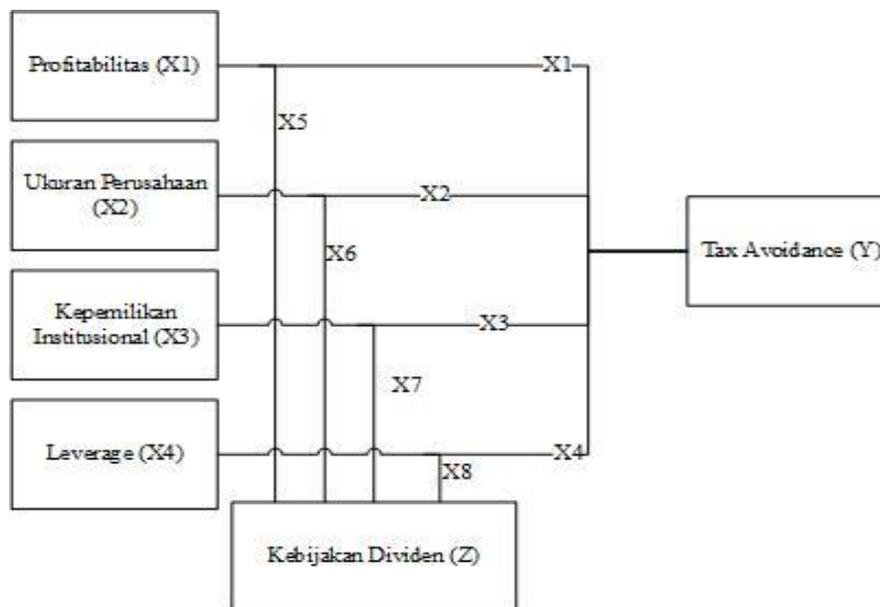
2.3 Kerangka Konseptual

Interaksi antara variabel independen dan dependen penelitian akan dijelaskan secara teoritis dengan menggunakan kerangka konseptual (Pasaribu & Mulyani, 2019). Mengikuti pembahasan penelitian terdahulu dan kajian teori, kerangka konseptual diperlukan untuk menjelaskan indikator-indikator dari setiap variabel dan untuk mendukung proses pembuatan hipotesis. Gambar berikut mengilustrasikan kerangka

pemikiran teoritis ini.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Seiring dengan meningkatnya laba perusahaan, begitu pula jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan lebih cenderung

menggunakan strategi penghindaran pajak ketika beban pajak lebih tinggi. (Arinda & Dwimulyani, 2018), Anggraeni & Oktaviani (2021), dan (Faradilla & Bhilawa, 2022) menemukan hasil yang serupa, yang didukung oleh pernyataan ini. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa taktik penghindaran pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh tingkat profitabilitas. Bertolak belakang dengan penelitian (Mailia, 2020), (Saputro, 2021), (Rachman, 2023) menemukan hasil profitabilitas tidak berpengaruh atau berpengaruh negative terhadap *Tax Avoidance*. Profitabilitas dapat dan tidak dapat mempengaruhi strategi penghindaran pajak, sesuai dengan hipotesis :

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan dengan banyak karyawan dan kapitalisasi pasar yang signifikan cenderung lebih stabil dan menguntungkan. Perusahaan besar dapat memanfaatkan celah yang diciptakan oleh perusahaan kecil untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak mereka. Menurut (Mailia, 2020), Hermawan dkk. (2021), dan Riskatari & Jati (2020), pernyataan tersebut memperkuat temuan penelitian yang menunjukkan dampak ukuran perusahaan terhadap pengurangan pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Meidiawati, 2016), (Prayogo & Desmiza, 2024), dan (Saputro,

2021) hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memengaruhi upaya untuk menghindari pajak. Penelitian terdahulu memungkinkan kami untuk menyatakan hipotesis sebagai berikut:

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Ketika kita berbicara tentang kepemilikan institusional, kita mengacu pada jumlah saham yang dipegang oleh organisasi atau pihak luar lainnya. Institusi tunduk pada pengawasan yang lebih tinggi sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Kemungkinan manajemen akan mengambil langkah-langkah untuk menghindari pembayaran pajak berkurang seiring dengan meningkatnya tingkat pengawasan. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Suryatna, 2023), (V. R. Putri & Putra, 2017), (A. A. Putri dkk., 2020), kapasitas perusahaan untuk menghindari pajak dipengaruhi oleh kepemilikan perusahaan. Sederhananya, perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak ketika tingkat kepemilikan institusional lebih tinggi. Sementara studi yang dilakukan oleh (Sudiarto dkk., 2022), dan (Afridayani & Islammia, 2023) menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berdampak pada menghindari pajak. Hal ini merupakan hipotesis kerja berdasarkan hasil penelitian sebelumnya:

H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.4.4 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan indikator keuangan yang mengukur sejauh mana suatu entitas didanai melalui hutang. Penilaian indikator ini menggunakan rasio total kewajiban dibandingkan dengan kerangka modal entitas, yang biasanya ditetapkan sebagai Rasio Utang terhadap Ekuitas. Dari beberapa penelitian dari (Faradilla & Bhilawa, 2022), (Hermawan dkk., 2021), dan (Prasatya dkk., 2020) *Leverage* berdampak positif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan (Rachman, 2023), dan (Nibras & Hadinata, 2020) menyatakan sebaliknya. Sehingga peneliti menarik hipotesis.

H4 : *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.4.5 Pengaruh Kebijakan Dividen Memoderasi Variabel Terhadap *Tax Avoidance*

Kebijakan dividen mengacu pada keputusan yang diambil oleh tim manajemen keuangan perusahaan tentang distribusi atau retensi laba. Perusahaan harus memprioritaskan pembagian dividen sebagai sarana distribusi kekayaan kepada para pemegang saham. Menurut Kuswanto (2023), perusahaan lebih cenderung melakukan manajemen pajak ketika dividen mereka lebih besar. Kebijakan dividen berhubungan dengan penghindaran pajak, menurut beberapa penelitian sebelumnya (Erianto & Fardinal, 2024), dan Anderson et al. (2022). Dua penelitian yang menunjukkan kebijakan dividen sebagai elemen

pemoderasi dalam kaitannya dengan penghindaran pajak adalah Maryanti & Ayem (2022), dan (Mery, 2017). Hasilnya, teori yang diajukan adalah:

H5: Kebijakan dividen memoderasi pengaruh variabel profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

2.4.6 Pengaruh Kebijakan Dividen Memoderasi Variabel Ukuran

Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Sebagai indikasi kinerja perusahaan yang kuat dan dedikasi manajemen untuk memberikan keuntungan kepada pemegang saham, pembayaran dividen umumnya dipandang sebagai indikasi positif oleh investor. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dividen biasanya lebih menarik bagi perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang signifikan. Insentif penghindaran pajak juga dapat dikurangi dengan cara ini. Kebijakan dividen merupakan komponen moderasi yang terkait dengan penghindaran pajak, menurut penelitian (Apsari & Setiawan, 2018), dan (Gunariato, 2023). Sehingga hipotesis yang dijelaskan adalah

H6: Kebijakan dividen memoderasi pengaruh variable ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

2.4.7 Pengaruh Kebijakan Dividen Memoderasi Variabel Kepemilikan

Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Karena fokus mereka pada pertumbuhan perusahaan jangka panjang daripada keuntungan cepat, investor institusional cenderung memiliki cakrawala investasi yang lebih panjang daripada investor individu. Akibatnya, para petinggi perusahaan mungkin merasa tertekan untuk memprioritaskan keuntungan jangka panjang dengan melakukan hal-hal seperti mengurangi bahaya strategi penghindaran pajak yang agresif. Studi oleh (Saputra, 2023), Wirianto dkk. (2021), dan (Setyawati, 2019) menyoroti pentingnya dividen sebagai variabel pemoderasi penghindaran pajak.

H7: Kebijakan dividen memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Tax Avoidance*

2.4.8 Pengaruh Kebijakan Dividen Memoderasi Variabel *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Interaksi antara variabel *Leverage* dan penghindaran pajak, dipengaruhi oleh kebijakan dividen, merangkum hubungan yang bernuansa antara strategi keuangan dan tata kelola perusahaan. *Leverage*, biasanya diukur dengan rasio hutang terhadap ekuitas, terbukti mempengaruhi perilaku penghindaran pajak sebagaimana dibuktikan oleh banyak penelitian. Insentif penghindaran pajak dapat dikurangi melalui pendekatan ini. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen memainkan peran moderasi dalam penghindaran

pajak (Apsari & Setiawan, 2018), dan (Saputra, 2023). Dengan demikian, hipotesis yang diusulkan ditetapkan.

H8: Kebijakan dividen memoderasi pengaruh leverage terhadap *Tax Avoidance*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Istilah “penelitian kuantitatif” mengacu pada penelitian yang mengandalkan analisis berbasis angka atau pengukuran untuk menarik kesimpulan. Tujuan dari penelitian kuantitatif di bidang ini adalah untuk memeriksa interaksi antara berbagai faktor untuk menguji teori. Untuk memastikan bahwa data numerik dapat dianalisis secara statistik, komponen-komponen ini selanjutnya dievaluasi dengan menggunakan berbagai alat penelitian. Jenis penyelidikan ilmiah lain yang menggunakan bukti numerik untuk memverifikasi atau menyangkal gagasan dikenal sebagai penelitian kuantitatif (Neliwati., 2018).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini terutama bertujuan untuk memeriksa laporan keuangan atau laporan tahunan yang disebarluaskan di situs resmi BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang dapat diakses di www.idx.co.id. Investigasi menggunakan laporan tahunan dari tahun 2019 hingga 2023 sebagai sumber data untuk variabel studi, yang meliputi: penghindaran pajak, profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan kebijakan dividen.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah orang atau objek yang dipilih dalam sebuah penelitian dengan karakteristik yang sama dari mana peneliti memperoleh temuan mereka (Sugiyono, 2018). Perusahaan-perusahaan BUMN yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menyampaikan laporan keuangan tahunan dari tahun 2019 hingga 2023 adalah subjek dari penelitian ini. Laporan keuangan untuk tahun 2019-2023, termasuk, menyediakan data yang digunakan dalam analisis ini. Sampel adalah representasi dari populasi dalam hal ukuran dan komposisinya. Peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi untuk meneliti elemen tertentu bila populasi terlalu besar untuk diteliti sekaligus karena keterbatasan waktu, tenaga, atau sumber daya (Sugiyono, 2021). Perusahaan yang akan terdaftar di BEI pada tahun 2019 hingga 2023 dan merupakan bagian dari BUMN dipilih dengan menggunakan kriteria tertentu.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel adalah proses memilih sampel yang valid secara statistik untuk sebuah investigasi. Purposive sampling, yang mempertimbangkan faktor-faktor tertentu untuk menghasilkan data yang relevan dengan penelitian, digunakan untuk sampel penelitian ini (Sugiyono, 2021) Untuk memilih subset bisnis BUMN, kami mempertimbangkan faktor-faktor berikut, antara lain.

Tabel 3.1**Tabel Kriteria Sampel**

Kriteria Sampel	Jumlah
Daftar perusahaan BUMN di BEI tahun 2019-2023	27
Perusahaan yang tidak membayar dividen antara 2019-2023	(17)
Jumlah sampel	10
Total tahun penelitian	5
Jumlah data	50

Tabel 3.2**Daftar Sampel**

No	Kode Saham	Nama Emitmen
1.	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
2.	BBNI	PT Bank Negara Indonesia Tbk
3.	BMRI	PT Bank Mandiri Tbk
4.	BBTN	PT Bank Tabungan Negara Tbk
5.	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk
6.	SMGR	PT Semen Indonesia Tbk
7.	WTON	PT Wijaya Karya Beton Tbk

8.	TLKM	PT Telkom Indonesia Tbk
9.	ELSA	PT Elnusa Tbk
10.	PTBA	PT Bukit Asam Tbk

3.5 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai data sekunder, yang mengacu pada informasi yang telah diperoleh dari sumber yang ada dari karya-karya yang telah dipublikasikan, catatan-catatan, atau penelitian yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Data dokumenter sering bermanifestasi sebagai bukti, dokumentasi, atau catatan sejarah yang telah dikumpulkan secara sistematis dalam repositori arsip. Perusahaan-perusahaan di industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2019 dan 2023 dianalisis menggunakan laporan keuangan. Laporan-laporan tersebut tersedia di www.idx.co.id.

3.6 Definisi Operasional Variabel

3.6.1 Variabel Dependen

Dalam Penghindaran pajak adalah variabel dependen dalam penelitian ini. Perusahaan dapat menghindari pajak secara legal jika mereka menginginkannya (Istiqfarosita & Abdani, 2022). Dalam analisis ini, Untuk merekonsiliasi laba akuntansi dengan laba pajak, perusahaan harus menyelaraskan laporan fiskal dengan laporan keuangan bisnisnya. Perusahaan melaksanakan penyesuaian ini

melalui proses penyesuaian atau rekonsiliasi, menggunakan rumus Book Tax Difference (BTD) (Windarti & Sina, 2017). Proksi BTD digunakan karena mewakili perbedaan keseluruhan antara akuntansi dan laba fiskal :

$$BTD = \frac{Laba Akuntansi - Laba Fiskal}{Total Aset}$$

3.6.2 Variabel Independen

Dalam penelitian ini, variabel bebas, atau independen, ialah

a. Profitabilitas

Salah Profitabilitas, atau kapasitas untuk menghasilkan laba, dari sebuah bisnis adalah salah satu metrik penting untuk mengevaluasi bisnis tersebut. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba mendorong investor untuk menanamkan modal untuk mengembangkan bisnis (Mardiana & Wuryani, 2019). Profitabilitas perusahaan dapat didefinisikan sebagai rasio penjualan, aset, dan modal terhadap laba yang dihasilkan (Nurhasan, 2023). Rasio Return on Equity (ROE) adalah cara untuk melihat seberapa baik kinerja perusahaan dalam mengubah investasi ekuitasnya menjadi laba (Hardianti, 2022). Metode untuk menentukan rasio ROE diberikan di bawah ini dalam (Rosandi, 2022) :

:

$$ROE = \frac{Laba Bersih Setelah Pajak}{Total Ekuitas} \times 100\%$$

b. Ukuran Perusahaan

Ukuran Ukuran perusahaan adalah kuantifikasi dari besarnya

perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan ditentukan oleh aset dan modalnya. Menurut Hermawan dkk. (2021), ukuran ini dapat menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Salah satu cara untuk mengkarakterisasi bisnis adalah dengan melihat total asetnya. Perusahaan dengan sumber daya yang lebih besar lebih cenderung mengambil risiko yang diperhitungkan, termasuk memperluas operasinya, daripada perusahaan yang lebih kecil (Hardianti, 2022). Menurut (Anita, 2015), organisasi besar dapat mengatasi kendala terkait aset karena mereka memiliki aset yang cukup besar untuk mendukung mereka. Dalam hal ini, total aset dikonversi menggunakan logaritma natural. Ukuran organisasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$Size = Ln(Total Assets)$$

c. Kepemilikan Institusional

Investor selain bank yang menanamkan uangnya ke dalam suatu bisnis dengan harapan pengembalian investasi (ROI) yang berbanding lurus dengan investasinya dikenal sebagai pemilik institusional. Menurut (Sudiarto dkk., 2022), tingkat pengembalian investasi dipengaruhi secara signifikan oleh keberhasilan keuangan perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kebijakan perusahaan. Menurut (Prasetyo, 2018), manajer tidak disarankan untuk

melakukan perilaku oportunistik ketika investor institusional meningkatkan pengawasan. Pemegang saham akan memiliki keyakinan akan keberhasilan perusahaan karena hal ini. Untuk menentukan Kepemilikan institusional dapat dinilai menggunakan rumus berikutnya (Ariawan & Setiawan, 2017):

$$KI = \frac{\text{Saham yang Dimiliki Institusional}}{\text{Saham yang Beredar}}$$

d. *Leverage*

Leverage yang meningkat dapat mengakibatkan peningkatan pengeluaran bunga dan penurunan pendapatan bagi perusahaan. Akibatnya, perusahaan harus menerapkan taktik pengurangan pajak (Faradilla & Bhilawa, 2022). *Leverage* berdasarkan 169/PMK. 010/2015 merupakan indikator keuangan yang menilai sejauh mana pendanaan entitas berasal dari hutang. Analisis indikator ini menggunakan rasio total kewajiban dalam kaitannya dengan komposisi modal entitas sehingga *Leverage* dihitung dengan rumus Debt Equity Ratio (DER).

$$DER = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

3.6.3 Variabel Moderasi

Variabel yang berfungsi sebagai moderator dalam penelitian ini adalah kebijakan mengenai dividen.. Menurut Saputra (2023), kebijakan dividen perusahaan adalah pendekatan perusahaan dalam menangani pendapatan yang diperoleh. Jika harga saham perusahaan terus naik, itu berarti investor mendapatkan bagian yang lebih besar dari laba perusahaan atau pengembalian pajak, yang pada gilirannya berarti nilai saham mereka naik (Apsari & Setiawan, 2018). (Estralita Trinawati, 2019) menyatakan bahwa Dividen Payout Ratio (DPR) berfungsi sebagai indikator proporsi pendapatan yang dialokasikan kepada pemegang saham dalam bentuk pencairan moneter.. Biasanya, pembayaran dividen ditentukan dengan menggunakan rasio ini, yang didefinisikan sebagai berikut:

$$DPR = \frac{\text{Dividen yang Dibayarkan}}{\text{Laba Bersih}} \times 100\%$$

Tabel 3.3

Tabel Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator Pengukuran
Variabel Independen			
1.	Profitabilitas	“Rasio seberapa baik sebuah perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dari sumber daya yang	ROE = Laba Bersih Setelah Pajak / Total Ekuitas x 100%

		dimilikinya, seperti aktiva, modal, atau penjualan, disebut "profitabilitas" (Nurhasan, 2023).	
2.	Ukuran Perusahaan	"Jumlah aktiva dan modal suatu perusahaan adalah ukuran perusahaan, yang dapat menunjukkan seberapa besar atau kecil perusahaan tersebut" (Hermawan dkk., 2021).	$Size = \ln(\text{Total Assets})$
3.	Kepemilikan Institusional	"Kepemilikan institusional mengacu pada jumlah saham yang dimiliki oleh investor asing, perwalian, lembaga pemerintah, dan lembaga lainnya" (Ristanti, 2022).	$KI = \frac{\text{Saham yang Dimiliki Institusional}}{\text{Saham yang Beredar}}$

4.	<i>Leverage</i>	<p>Dalam konteks 169/PMK. 010/2015 penentuan kewajiban Pajak Penghasilan, penilaian modal relatif terhadap modal lain bagi wajib pajak digambarkan atau didefinisikan di Indonesia, di mana modal tersegmentasi menjadi saham.</p>	$\text{DER} = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total ekuitas}} \times 100\%$
Variabel Dependen			
5.	<i>Tax Avoidance</i>	<p>“Untuk merekonsiliasi perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak, organisasi harus membuat laporan keuangan fiskal sesuai dengan laporan keuangan perusahaan. Proksi BTD digunakan karena</p>	$\text{BTD} = \frac{(\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal})}{\text{Total Aset}}$

		kapasitasnya untuk merangkum perbedaan komprehensif antara laba akuntansi dan laba fiskal.”(Windarti & Sina, 2017).	
Variabel Moderasi			
6.	Kebijakan Dividen	“Persentase keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai disebut Dividend Payout Ratio (DPR)” (Estralita Trinawati, 2019).	$\text{DPR} = \frac{\text{Dividen yang Dibayarkan}}{\text{Laba Bersih}} \times 100\%$

3.7 Analisis Data

Analisis data panel dilakukan dengan aplikasi Eviews. EViews berlaku untuk mengatasi masalah yang terkait dengan analisis deret waktu, data cross-sectional, atau data panel (Winarno, 2017).

3.7.1 Analisis Deskriptif

Semua variabel penelitian memiliki nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum yang diungkap dengan menggunakan statistik deskriptif. Tujuan dari statistik deskriptif adalah untuk membuat data lebih mudah dipahami dan dirinci dengan memberikan deskripsi atau penjelasan mengenai data tersebut.

3.7.2 Analisis Pemilihan Model

Untuk menilai data panel dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM), penelitian ini menggunakan metode estimasi model regresi. Mengidentifikasi model regresi yang optimal adalah pendorong di balik penelitian ini. Sebelumnya, model tersebut diuji dengan menggunakan uji Chow, Housman, dan LM.

a. Uji Chow

Untuk mengetahui apakah model efek umum atau efek permanen lebih baik, uji Chow melihat nilai probabilitas (p) untuk Cross Section F. Nilai p kurang dari 0,05 mengindikasikan penggunaan model efek permanen, sementara nilai p lebih dari 0,05 mengindikasikan penggunaan model efek umum.

b. Uji Hausman

Ketika memutuskan antara model efek tetap dan model efek peluang, uji Hausman dapat membantu dalam memilih salah satu yang

paling sesuai dengan data. Dengan menggunakan nilai probabilitas penampang acak (p), keputusan dibuat. Model efek tetap dipilih ketika nilai p kurang dari 0,05 dan model efek peluang dipilih ketika nilai p lebih besar dari 0,05.

c. Uji LM

Dalam contoh uji Lagrange Multiplier (LM), tidak mungkin untuk memastikan apakah model random effect lebih unggul daripada Common Effect Model (OLS) jika uji Chow dan Hausman menunjukkan bahwa model Fixed Effect lebih tepat.

Tabel 3.4

Model Pemilihan

Uji	Hasil	Keputusan
Uji Chow	Prob < 0,05	FEM
	Prob > 0,05	CEM
Uji Hausman	Prob < 0,05	FEM
	Prob > 0,05	REM
Uji LM	Prob < 0,05	REM
	Prob > 0,05	CEM

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk memeriksa apakah model tersebut sudah benar, uji asumsi klasik digunakan. Uji autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas digunakan dalam penelitian ini.

a. Uji Normalitas

Untuk mengetahui dan memastikan apakah dataset yang digunakan dalam analisis regresi mematuhi distribusi normal, salah satu uji prasyarat atau asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas eviews. Variabel residual tidak terstandardisasi inilah yang digunakan dalam uji normalitas eviews. Uji normalitas jarque bera adalah prosedur yang paling sering digunakan dalam Eviews. Tingkat signifikansi 5%, atau 0,05, digunakan dalam penelitian ini. Data dianggap memiliki distribusi normal jika nilai Kolmogorov-Sminov lebih besar dari 5% dan distribusi tidak normal jika kurang dari 5%.

b. Uji Multikolinearitas

Jika model regresi memprediksi bahwa variabel independen saling berkorelasi, maka uji multikolinearitas akan mengetahuinya. Suatu pertanda yang sangat baik adalah apabila variabel-variabel independen tidak berkorelasi satu sama lain. Salah satu cara untuk memeriksa adanya multikolinearitas di dalam suatu model regresi adalah dengan melihat nilai inflation variation factor (VIF). Model regresi

dianggap bebas dari multikolinearitas jika nilai inflation variation factor (VIF) kurang dari 10 dan nilai tolerance kurang dari 0,1.

c. Uji Heterokedastisitas

Untuk memeriksa apakah perbedaan residual antar pengamatan tidak sama, uji heteroskedastisitas diterapkan pada model regresi. Heteroskedastisitas mengacu pada situasi di mana perbedaan muncul di antara pengamatan, sementara homoskedastisitas menggambarkan situasi di mana perbedaan antara residual konstan. Model regresi yang baik tidak akan memiliki heteroskedastisitas. Residual model regresi data panel dapat diuji heteroskedastisitasnya untuk melihat apakah residual tersebut menunjukkan adanya variasi. Jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka terdapat heteroskedastisitas; jika lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji Dengan menggunakan sejumlah observasi yang telah ditentukan yang diambil pada waktu yang telah ditentukan, uji autokorelasi menentukan apakah anggota atau residual berkorelasi. Menguji autokorelasi menggunakan prosedur uji LM Jika Obs R-Squared memiliki nilai probabilitas lebih tinggi dari 0,05, maka autokorelasi mungkin tidak ada. Kita perlu menguji hipotesis yaitu H_0 . “Tidak ada autokorelasi” (>0.05)

HA. “Ada autokorelasi” (< 0.05)

3.7.4 Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2011), koefisien determinasi menunjukkan seberapa jauh Kapasitas model untuk menjelaskan fluktuasi variabel dependen. R^2 adalah ukuran kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen, atau koefisien determinasi. Regresi dianggap lebih baik ketika R^2 lebih besar. Kecocokan sempurna antara nilai yang diprediksi dan yang diamati dicapai ketika $R^2 = 1$. Angka R^2 menunjukkan persentase di mana variabel independen dapat menjelaskan perubahan variabel dependen, sementara faktor-faktor lain menjelaskan perubahan yang tersisa ($1 - R^2$).

b. Uji T

Variabel dependen, penghindaran pajak, sangat dipengaruhi pada tingkat yang lebih rendah oleh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional. Penelitian ini menggunakan uji T statistik. Ketika t -hitung lebih besar dari $t(\alpha-1)$, maka H_0 ditolak pada ambang batas signifikansi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan parsial antara variabel dependen dan independen. Untuk sebagian besar, teori-teori tersebut adalah

H0 : “Variabel dependen dan masing-masing variabel independen tidak memiliki dampak yang signifikan”.

H1 : “Variabel dependen dan masing-masing variabel independen memiliki dampak yang signifikan”.

Hipotesis nol (H0) akan ditolak jika probabilitas p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi (α). Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan yang substansial antara kedua variabel. Membandingkan nilai t-tabel kritis dengan nilai t-statistik dari temuan regresi adalah metode lain untuk mengevaluasi hipotesis ini. Untuk menolak H0 dan menerima H1, kita perlu melihat apakah nilai t-statistik lebih tinggi dari nilai t-tabel. Hal ini akan menunjukkan bahwa variabel dependen dan independen berhubungan.

3.7.5 Analisis Regresi Moderasi

Salah satu pendekatan untuk menguji variabel moderasi adalah melalui analisis moderasi. Ketika menggunakan analisis regresi moderasi, semua asumsi yang terkait dengan regresi terpenuhi. Artinya, kriteria atau syarat yang dipakai untuk analisis regresi moderasi sama dengan syarat yang dipakai untuk analisis regresi penuh. Menurut Setiawan & Suwaidi (2022), salah satu Tujuan utama dari melakukan analisis regresi moderasi adalah untuk memastikan sejauh mana variabel moderasi berpotensi meningkatkan atau mengurangi kekuatan hubungan yang ada antara variabel independen dan dependen dalam

konteks tertentu. Untuk mengevaluasi apakah ada korelasi yang signifikan antara kebijakan dividen dan berbagai faktor seperti ukuran perusahaan, profitabilitasnya, tingkat kepemilikan kelembagaan, dan praktik yang terkait dengan penghindaran pajak, penerapan analisis regresi moderasi menjadi penting untuk memperoleh wawasan yang berarti. Metode analisis ini tidak hanya memberikan kejelasan tentang keterkaitan ini tetapi juga berfungsi sebagai alat penting untuk memahami dinamika yang mempengaruhi strategi keuangan perusahaan secara komprehensif..

Langkah-langkah untuk uji regresi melalui beberapa tahap. Mulai dari persiapan data hingga interpretasi, analisis regresi linier berganda menggunakan EViews adalah rangkaian tindakan sistematis. Pada tahap pertama analisis ini, data dimasukkan ke dalam EViews dalam format terstruktur. Selanjutnya memastikan variabel terikat dan variabel bebas telah didefinisikan dengan baik. Setelah data dimasukkan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dibuat. Setiap variabel, seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, dan penghindaran pajak, dapat ditampilkan, sehingga data akan terisi sendiri. Langkah pertama pilih menu cepat untuk membuka jendela estimasi. Kemudian, pilih Estimasi Equation. Selanjutnya memilih model pada jendela yang muncul dan memasukkan semua variabel. Di

bagian paling kiri, variabel dependen ditulis, kemudian ada variabel penjelas dan konstanta atau intersep (C).

Pengujian dilanjutkan uji asumsi klasik yang terdiri dari Setelah semua pengujian selesai, uji kelayakan model atau Goodness of Fit Model dilakukan. Pada tahap ini, nilai R-Square diperiksa untuk mengetahui seberapa baik model menjelaskan variasi dalam data; nilai R-Square yang tinggi ini menunjukkan bahwa model dibuat dengan baik. Langkah terakhir adalah interpretasi model dilakukan setelah semua pengujian dan evaluasi selesai. Pada langkah ini, Anda harus menjelaskan koefisien regresi, signifikansi statistik, dan implikasi dari hasil yang diperoleh. Setelah melalui langkah-langkah secara sistematis. Menggunakan EViews untuk melakukan analisis regresi linier berganda dapat secara efektif dan membuat model yang valid dan dapat diandalkan Studi yang dilakukan oleh (Mery, 2017) menemukan bahwa persamaan regresi untuk analisis regresi moderasi dapat dibentuk seperti berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_1.M + b_6X_2.M + b_7X_3.M + b_8X_4.M + c$$

Keterangan :

Y : *Tax Avoidance*

X1 : Profitabilitas

X2 : Ukurang Perusahaan

X3 : Kepemilikan Institusional

X4 : *Leverage*

M : Kebijakan Dividen

α : Konstanta

b : Koefisien Regresi

c : Residu

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, entitas yang diselidiki adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Seleksi dilakukan berdasarkan kriteria sampling tertentu, yaitu:

- Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 2017 hingga 2021;
- Badan Usaha Milik Negara telah diamanatkan untuk mengungkapkan laporan keuangan dan laporan tahunan setidaknya sejak 2019;
- Badan Usaha Milik Negara yang menyediakan data komprehensif yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan antara 2019 dan 2023;

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, total 10 sampel diidentifikasi yang memenuhi persyaratan ini.

Tabel 4.1
Daftar Sampel

No	Kode Saham	Nama Emitmen
1.	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
2.	BBNI	PT Bank Negara Indonesia Tbk
3.	BMRI	PT Bank Mandiri Tbk
4.	BBTN	PT Bank Tabungan Negara Tbk
5.	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk
6.	SMGR	PT Semen Indonesia Tbk
7.	WTON	PT Wijaya Karya Beton Tbk
8.	TLKM	PT Telkom Indonesia Tbk
9.	ELSA	PT Elnusa Tbk
10.	PTBA	PT Bukit Asam Tbk

Akibatnya, pemeriksaan akan dilakukan pada beberapa sampel yang disebutkan di atas untuk memastikan dampak profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan leverage pada perilaku penghindaran pajak, dengan variabel kebijakan dividen berfungsi sebagai faktor moderasi.

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dicirikan sebagai pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan keberadaan variabel secara independen, terlepas dari apakah

mereka bermanifestasi dalam contoh tunggal atau ganda (variabel tidak dibatasi), tanpa terlibat dalam perbandingan antara variabel itu sendiri atau mencari korelasi dengan variabel alternatif (Sugiyono, 2021).

Pemeriksaan ini juga digunakan untuk meramalkan dan menafsirkan informasi mengenai variabel independen, dependen, dan moderasi. Analisis statistik deskriptif merupakan salah satu metodologi pemeriksaan data dengan tujuan menawarkan penjelasan yang komprehensif, melalui perhitungan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (rata-rata), dan standar deviasi (standar deviasi).

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Mean	Median	Minimum	Maximum	Std. Deviation	N
X1	0.117511	0.106039	0.009737	0.434171	0.077167	50
X2	32.52200	32.53975	29.54868	35.31545	1.967651	50
X3	0.891010	0.946000	0.555000	0.994000	0.118212	50
X4	3.865915	1.271330	0.374953	17.07140	4.408521	50
Y	0.016681	0.009986	0.000312	0.075462	0.017832	50
Z	0.467226	0.493559	0.013060	0.999999	0.253518	50

Tabel tersebut menyajikan data mengenai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi untuk setiap variabel yang diperiksa dalam penelitian ini:

1. Variabel dependen (Y) yang berkaitan dengan penghindaran pajak dalam BUMN yang diperiksa dalam penelitian ini, dengan total ukuran sampel 10, menunjukkan nilai maksimum 0,075462, sesuai dengan nilai BTD dari PT. Bukit Asam Tbk. pada tahun 2022; nilai minimum 0,000312, berkaitan dengan nilai BTD dari PT. Wijaya Karya Beton Tbk. tahun 2021; nilai rata-rata 0,016681; dan standar deviasi 0,017832.
2. Variabel independen (X1) yang berkaitan dengan profitabilitas di BUMN yang diperiksa dalam penelitian ini, mencakup ukuran sampel total 10 entitas, menunjukkan nilai maksimum 0,434171, sesuai dengan ROE PT. Bukit Asam Tbk. untuk tahun 2022; nilai minimum 0,009737, terkait dengan ROE PT. Wijaya Karya Beton Tbk. untuk tahun 2023; nilai rata-rata 0,17511; dan standar deviasi 0,077167.
3. Variabel independen (X2) yang mewakili ukuran perusahaan dalam konteks BUMN yang diperiksa dalam penyelidikan ini, yang terdiri dari total ukuran sampel 10, menunjukkan nilai maksimum 35.31545, sesuai dengan metrik ukuran PT. Bank Mandiri Tbk. pada tahun 2023; nilai minimum 29.54868, mencerminkan ukuran metrik PT. Elnusa Tbk. pada tahun 2019; nilai rata-rata 32.52200; dan standar deviasi 1.967651.
4. Variabel independen (X3), yang mewakili ukuran perusahaan dalam perusahaan milik negara yang diperiksa dalam penelitian ini, terdiri dari ukuran sampel total 10 pengamatan. Nilai maksimum yang diamati adalah 0,994000, sesuai dengan nilai KI PT. Telkom Indonesia Tbk. pada tahun 2019; nilai minimum

tercatat 0,555000, dikaitkan dengan nilai KI PT. Wijaya Karya Beton Tbk. untuk tahun yang sama; nilai rata-rata yang dihitung adalah 0,891010; dan standar deviasi terukur sebagai 0,118212.

5. Variabel independen (X4) yang mewakili leverage dalam BUMN yang diperiksa dalam penelitian ini, terdiri dari ukuran sampel total 10 pengamatan, menunjukkan nilai maksimum 17.07140, khususnya Debt to Equity Ratio (DER) PT. Bank Tabungan Negara Tbk. tercatat pada tahun 2020; nilai minimum 0,374953, sesuai dengan DER PT. Aneka Tambang Tbk. mencatat pada tahun 2023; nilai rata-rata 3,865915; dan standar deviasi 4,408521.
6. Variabel moderasi (z) yang berkaitan dengan kebijakan dividen dalam BUMN yang diperiksa dalam penelitian ini, yang mencakup total ukuran sampel 10, menunjukkan nilai maksimum 0,999999, yang secara khusus mencerminkan nilai DPR PT. Aneka Tambang Tbk. untuk tahun 2023; nilai minimum 0,013060, sesuai dengan nilai PT. Bank Tabungan Negara Tbk. pada tahun 2020; nilai rata-rata 0,467226; dan standar deviasi 0,253518.

4.1.3 Uji Pemilihan Model

1. Uji Chow

Tabel 4.3
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d,f,	Prob,
Cross-section F	9,578520	(9,35)	0,0000
Cross-section Chi-square	62,107458	9	0,0000

Menurut data yang disajikan pada Tabel 4.3, penampakan Chi-Square menunjukkan nilai probabilitas 0,0000, yang kurang dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model optimal adalah model efek tetap.

2. Uji Hausman

Tabel 4.4
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq, Statistic	Chi-Sq, d,f, Prob,
Cross-section random	10,455109	5 0,0633

Menurut data yang diilustrasikan pada tabel 4.4, terbukti bahwa nilai probabilitas acak cross-sectional berada di 0,0633, yang melebihi ambang 0,05; oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model yang paling cocok adalah model efek acak.

3. Uji LM

Tabel 4.5
Uji LM

	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	15,33095 (0,0001)	0,303654 (0,5816)	15,63460 (0,0001)
Honda	3,915475 (0,0000)	-0,551048 (0,7092)	2,379010 (0,0087)
King-Wu	3,915475 (0,0000)	-0,551048 (0,7092)	1,713415 (0,0433)
Standardized Honda	5,944827 (0,0000)	-0,304511 (0,6196)	0,305869 (0,3799)
Standardized King-Wu	5,944827 (0,0000)	-0,304511 (0,6196)	-0,399855 (0,6554)

Gourieroux, et al,	--	--	15,33095 (0,0002)
--------------------	----	----	----------------------

Menurut informasi yang disajikan pada tabel 4.5, terbukti bahwa nilai probabilitasnya adalah 0,0001, yang kurang dari 0,05; oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model optimal adalah model efek acak.

4.1.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.6

Hasil Analisis Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1,000000	0,203552	0,217292	-0,101811
X2	0,203552	1,000000	0,721605	0,590606
X3	0,217292	0,721605	1,000000	0,154264
X4	-0,101811	0,590606	0,154264	1,000000

Ketika jumlah masalah terbatas, model regresi dianggap memuaskan.

Untuk memastikan adanya multikolinearitas, koefisien korelasi dianalisis. Koefisien yang jatuh di bawah ambang 0,90 menandakan tidak adanya multikolinearitas, sedangkan yang melebihi 0,90 menunjukkan adanya multikolinearitas. Berdasarkan temuan yang disajikan pada Tabel 4.6, terbukti bahwa koefisien korelasi dari semua variabel independen tetap di bawah tanda 0,90. Akibatnya, seseorang dapat menyimpulkan bahwa hasil tes tidak memiliki multikolinearitas atau berhasil lulus penilaian multikolinearitas.

4.1.5 Uji Hipotesis

1. Uji T

Tabel 4.7
Hasil Analisis Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std, Error	t-Statistic	Prob,
C	0,119696	0,042697	2,803414	0,0074
X1	0,123410	0,014661	8,417393	0,0000
X2	-0,004341	0,001478	-2,937463	0,0052
X3	0,030222	0,012914	2,340286	0,0238
X4	-0,000843	0,000545	-1,546631	0,1290

Memanfaatkan model efek acak yang dipilih, persamaan regresi linier diturunkan seperti yang disajikan di bawah ini:

$$Y=0.1196+0.1234X1-0.0043X2+0.0302X3-0.0008X4$$

2. Uji Koefisien R2

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien R2

	Panel Data Regression	MRA
Adjusted R-squared	0,597228	0,835006
Prob(F-statistic)	0,000000	0,000000

Dari tabel 4.8 dapat dilihat koefisien determinasi yang dihasilkan pada uji Adjusted R-squared pada penelitian ini adalah 0,597228 atau

59,72% untuk regresi unmoderated. Dan untuk uji Adjusted R-squared pada regresi moderat adalah 0,835006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, intensitas modal dan ukuran perusahaan mampu berkontribusi mempengaruhi penghindaran pajak sebesar 59,72% untuk regresi tidak moderat dan 83,5% untuk regresi moderat.

3. Uji Moderated Regression Analysis

Tabel 4.9
Hasil Analisis Moderated Regression Analysis

Variable	Coefficient	Std, Error	t-Statistic	Prob,
C	0,005837	0,035618	0,163869	0,8707
X1	0,146578	0,027771	5,278130	0,0000
X2	-0,000879	0,001435	-0,612453	0,5437
X3	0,027230	0,020926	1,301241	0,2006
X4	-0,000504	0,000332	-1,517428	0,1370
Z	0,164028	0,079920	2,052412	0,0467
X1Z	-0,003725	0,034030	-0,109462	0,9134
X2Z	-0,005663	0,003062	-1,849691	0,0718
X3Z	0,033870	0,050821	0,666453	0,5089
X4Z	-0,003276	0,001486	-2,204223	0,0333

Memanfaatkan model efek acak yang dipilih, persamaan regresi linier diturunkan sebagai berikut:

$$Y = 0,0058 + 0,146X_1 - 0,0008X_2 + 0,0272X_3 - 0,0005X_4 - 0,0037X_1$$

$$Z - 0,0056X_2 Z + 0,0338X_2 Z - 0,0032X_2 Z$$

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Variabel profitabilitas menunjukkan pengaruh positif pada penghindaran pajak, sebagaimana dibuktikan dengan nilai probabilitas jatuh di bawah ambang signifikansi 5%. Temuan ini mendukung penerimaan hipotesis H1. Secara khusus, ketika profitabilitas perusahaan meningkat, demikian juga kewajiban pajaknya, sehingga meningkatkan kemungkinan perusahaan terlibat dalam strategi penghindaran pajak: tingkat profitabilitas yang tinggi berkorelasi dengan beban pajak yang diperkuat. Akibatnya, manajemen cenderung mengalokasikan keuntungan dalam organisasi dengan cara yang meminimalkan kewajiban fiskal, terutama kewajiban pajak. Perencanaan pajak yang efektif berperan penting dalam memfasilitasi tujuan ini, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Arinda & Dwimulyani (2018), Anggraeni & Oktaviani (2021), dan Faradilla & Bhilawa (2022), menunjukkan bahwa profitabilitas berdampak pada penghindaran pajak. Sebaliknya,

proposisi ini bertentangan dengan temuan yang disajikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mailia (2020), Saputro (2021), dan Rachman (2023), yang mengklaim bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

4.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Pengukuran variabel ukuran perusahaan memberikan pengaruh negatif yang signifikan pada penghindaran pajak, sebagaimana dibuktikan oleh nilai koefisien -0.0043 dengan probabilitas yang sesuai $0,0052$, yang kurang dari ambang $0,05$. Ini menunjukkan bahwa Hipotesis 2 divalidasi. Secara khusus, ketika ukuran perusahaan meningkat, begitu juga asetnya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk mengakomodasi kewajiban pajak. Selain itu, perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya manusia yang lebih profesional, yang memfasilitasi pengurangan penghindaran pajak.

Temuan penelitian ini selaras dengan studi sebelumnya Mailia (2020); Riskatari & Jati (2020), yang menegaskan bahwa besarnya organisasi berdampak pada strategi penghindaran pajaknya. Namun demikian, penyelidikan ini menantang kesimpulan yang ditarik oleh peneliti lain (Meidiawati, 2016); Prayogo & Desmiza (2024), yang berpendapat bahwa ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh pada perilaku penghindaran pajak.

4.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Menurut temuan yang diperoleh dari uji t yang dilakukan dalam penelitian ini, kepemilikan institusional menunjukkan dampak positif dan signifikan secara statistik terhadap penghindaran pajak, dengan nilai koefisien 0,0302 dan nilai probabilitas t-statistik yang lebih rendah dari ambang signifikansi yang ditetapkan ($0,0238 < 0,05$). Akibatnya, hipotesis 3 divalidasi, menunjukkan bahwa kepemilikan kelembagaan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Eskalasi saham ekuitas institusional menyiratkan bahwa entitas bisnis cenderung meminimalkan kewajiban pajak yang ditentukan oleh peraturan fiskal, sehingga memperburuk penggelapan pajak. Peningkatan kepemilikan institusional berkorelasi dengan peningkatan kontrol perusahaan oleh pemangku kepentingan eksternal, memfasilitasi penghindaran pajak. Ini sejalan dengan tujuan pemegang saham yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan besar, sehingga mengharuskan manajer menerapkan strategi pengurangan biaya, salah satunya termasuk penghindaran pajak.

Sesuai dengan penyelidikan tertentu sebelumnya, telah ditetapkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Suryatna (2023), V. R. Putri & Putra (2017), dan A. A. Putri dkk., (2020) bahwa kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak

dipengaruhi oleh struktur kepemilikannya. Intinya, perusahaan lebih cenderung mengejar strategi penghindaran pajak ketika ada tingkat kepemilikan institusional yang tinggi. Sebaliknya, studi yang dilakukan oleh Sudiarto dkk. (2022) dan Afridayani & Islammia (2023) telah menunjukkan bahwa kepemilikan kelembagaan tidak memberikan efek signifikan pada praktik penghindaran pajak.

4.2.4 Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Menurut temuan yang diperoleh dari uji-t, terbukti bahwa variabel leverage menunjukkan nilai koefisien yang dihitung -0.0008 , dengan tingkat signifikansi $0,1290$ ($0,1290 > 0,05$). Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak, menunjukkan tidak adanya efek leverage pada penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa tingkat leverage perusahaan tidak mempengaruhi strategi penghindaran pajaknya.

Sesuai dengan berbagai investigasi yang dilakukan oleh Rachman (2023), Nibras & Hadinata (2020), dan Sari dkk. (2022), telah ditetapkan bahwa leverage tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian oleh Faradilla & Bhilawa (2022), Hermawan dkk. (2021), dan Prasatya dkk. (2020) menunjukkan bahwa leverage memang mempengaruhi penghindaran pajak.

4.2.5 Pengaruh Kebijakan Dividen memoderasi Variabel Profitabilitas pada Tax Avoidance

Menurut hasil yang diperoleh dari evaluasi analitis, disimpulkan bahwa nilai signifikansi yang berkaitan dengan korelasi antara kepemilikan institusional dan profitabilitas yang terkait dengan penghindaran pajak adalah 0,913, yang melampaui ambang batas yang ditetapkan sebesar 0,05. Akibatnya, hipotesis kelima dianggap tidak valid, menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak bertindak sebagai variabel moderasi antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan dividen dalam entitas perusahaan tidak mempengaruhi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak, mengingat bahwa kebijakan dividen secara fundamental terkait dengan dinamika operasional organisasi; oleh karena itu, ada atau tidak adanya distribusi dividen tidak memengaruhi strategi penghindaran pajak melalui profitabilitas. Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astrela & Putu (2023), Devi & Suardana (2022), dan Astrela & Putu (2023) yang berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak memoderasi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Meskipun kebijakan dividen dapat mempengaruhi perencanaan dan penilaian pajak perusahaan, kebijakan tersebut tidak mengubah hubungan antara profitabilitas dan

penghindaran pajak, sebagaimana dikuatkan oleh penyelidikan perusahaan barang konsumsi Indonesia, yang menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut dapat mempengaruhi konsekuensi penghindaran pajak pada penilaian perusahaan, kebijakan tersebut tidak memediasi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak.

4.2.6 Pengaruh Kebijakan Dividen memoderasi Variabel Ukuran Perusahaan pada Tax Avoidance

Analisis komprehensif yang dilakukan menjelaskan bahwa tingkat signifikansi yang dihitung pada 0,071, yang jelas melampaui ambang konvensional 0,05, dengan tegas menunjukkan kurangnya interaksi antara kebijakan dividen dan ukuran perusahaan dalam peran mereka sebagai moderator penghindaran pajak; sebagai konsekuensi langsung dari temuan ini, hipotesis keenam, yang menyatakan bahwa kebijakan dividen memberikan pengaruh pada hubungan antara ukuran perusahaan dan tingkat penghindaran pajak, dengan tegas dibantah. Mengingat penyelidikan ilmiah sebelumnya yang secara konsisten menunjukkan non-pengaruh kebijakan dividen pada hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak, ini lebih lanjut memperkuat gagasan bahwa kebijakan dividen tidak memainkan peran penting dalam mengubah atau memodifikasi asosiasi khusus ini, sebagaimana

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Devi & Suardana (2022), dan (Suyanto dkk., 2021).

4.2.7 Pengaruh Kebijakan Dividen memoderasi Variabel Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance

Analisis menjelaskan nilai signifikansi 0,508, melampaui ambang batas yang ditetapkan sebesar 0,05, sehingga menunjukkan tidak adanya interaksi antara kebijakan dividen dan kepemilikan institusional mengenai pengaruhnya terhadap penghindaran pajak, akibatnya mengarah pada penolakan hipotesis ketujuh yang menyatakan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya (Moeljono, 2023), dan E.G.Dewi dkk., (2021) terbukti bahwa kebijakan dividen tidak memberikan pengaruh pada hubungan antara kepemilikan kelembagaan dan penghindaran pajak, sehingga menunjukkan bahwa keputusan keuangan, seperti yang berkaitan dengan kebijakan dividen, tidak meningkatkan efek kepemilikan institusional pada perilaku penghindaran pajak.

4.2.8 Pengaruh Kebijakan Dividen memoderasi Variabel Leverage pada Tax Avoidance

Analisis empiris mengungkapkan bahwa kebijakan dividen memberikan efek moderasi negatif pada hubungan antara leverage dan penghindaran pajak, seperti yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,033, sehingga menguatkan hipotesis keenam bahwa kebijakan dividen melemahkan dampak leverage pada penghindaran pajak, seperti yang ditunjukkan oleh koefisien negatif. Penelitian ilmiah Maduma & Naibaho (2022), Selvy & Esra, (2022), dan E. G. Dewi dkk., (2021) menyatakan bahwa kebijakan dividen memainkan peran penting dalam membentuk interaksi antara leverage dan penghindaran pajak, mengingat bahwa distribusi dividen yang meningkat dapat mengurangi keuntungan pajak yang terkait dengan hutang, akibatnya mempengaruhi rasio leverage; lebih jauh lagi, pengungkapan entitas berhutang dapat meningkatkan penilaian perusahaan dengan mengurangi kewajiban pajak terkait bunga, sehingga menunjukkan bahwa kebijakan dividen bertindak untuk mengurangi korelasi antara leverage dan penghindaran pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Investigasi ilmiah ini dengan cermat mengeksplorasi berbagai faktor penentu yang secara signifikan mempengaruhi strategi penghindaran pajak, dengan penekanan terkonsentrasi pada elemen-elemen penting seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, tingkat kepemilikan kelembagaan, dan tingkat leverage, sementara juga mempertimbangkan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi potensial khususnya dalam konteks BUMN yang terdaftar secara publik di Bursa Efek Indonesia selama jangka waktu yang berlangsung dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Hasil yang diperoleh dari analisis komprehensif ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kecenderungan penghindaran pajak di antara perusahaan-perusahaan ini. Sebaliknya, dimensi mengenai ukuran perusahaan mengungkapkan korelasi negatif yang signifikan dengan perilaku penghindaran pajak, menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar mungkin terlibat dalam strategi penghindaran pajak yang lebih sedikit. Secara bersamaan, variabel leverage tampaknya tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan penghindaran pajak, menunjukkan bahwa itu tidak memainkan peran penting dalam mempengaruhi praktik-praktik ini, dan lebih jauh lagi, eksplorasi kebijakan dividen mengungkapkan bahwa itu tidak berfungsi sebagai moderator yang efektif dalam keterkaitan antara profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan

institusional yang berkaitan dengan penghindaran pajak. Meskipun demikian, analisis menyoroiti bahwa sementara kebijakan dividen mungkin tidak mempengaruhi hubungan yang disebutkan di atas secara langsung, mereka memiliki kapasitas untuk mengurangi dampak leverage pada praktik penghindaran pajak, menunjukkan peran bernuansa dalam dinamika keuangan ini. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana berbagai faktor keuangan dan kelembagaan berinteraksi dalam ranah penghindaran pajak, terutama dalam konteks unik perusahaan milik negara Indonesia. Secara keseluruhan, temuan ini menggarisbawahi kompleksitas strategi penghindaran pajak dan interaksi kritis dari faktor penentu keuangan yang berbeda dalam membentuk perilaku perusahaan dalam domain ini.

5.2 Saran

Kendala penting dari penelitian ini terletak pada penekanan tunggal pada organisasi yang dikategorikan sebagai perusahaan milik negara dalam konteks Indonesia. Diharapkan para sarjana selanjutnya akan memperluas parameter pemilihan sampel mereka untuk mencakup tidak hanya perusahaan milik negara di Indonesia, tetapi juga perusahaan dari berbagai negara lain. Penyesuaian metodologis ini akan memungkinkan pencapaian rangkaian temuan yang lebih luas. Selain itu, peneliti mungkin mempertimbangkan penggabungan atau penggantian variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dengan elemen alternatif yang mungkin memberikan pengaruh signifikan pada penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridayani, A., & Islammia, R. (2023). Pengaruh Financial Distress dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance dengan Intensitas Aset Tetap sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 6(1), 51. <https://doi.org/10.32493/dr.b.v6i1.28079>
- Anderson, M., Kabir, M., Rashid, H., & Warsame, H. (2022). Corporate Dividend Policy and Tax Avoidance. *Canadian Tax Journal*, 70(4), 747–784. <https://doi.org/10.32721/ctj.2022.70.4.anderson>
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 390–397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1530>
- Anita, F. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Real Estate Dan Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013). *Jurnal Siasat Bisnis*, 112.
- Apsari, L., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 23, 1765. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i03.p06>
- Ariawan, i M. A. R. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax

Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831–1859.

Arinda, H., & Dwimulyani, S. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 123–140.

Astrela, W. M., & Putu, W. N. L. (2023). The Effect Tax Avoidance, Profitability, And Leverage On Firm Value With Dividend Policy As A Moderating Variable. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.

Aulia, N., & Purwasih, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Property dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020). *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 3(2), 395–405.

Baker, P. L. (2021). *Does Tax Avoidance Impair Accounting Comparability? Accepted for publication in the Journal of Accounting Literature Does Tax Avoidance Impair Accounting Comparability? 44(0)*.

BPS. (2023). *Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah*. 112.

Devi, D. A. Y., & Suardana, K. A. (2022). Dividend Policy Moderated the Influence of Profitability, Company Size, Liquidity on the Value of Banking Companies 2016–2020. *European Journal of Business and Management Research*, 7(3), 327–

334. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2022.7.3.1394>

Dewi, D., & Sudiartha, G. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Struktur Modal Dan Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 6(4), 242635.

Dewi, E. G., Wijaya, R. A., & Sari, Y. P. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Intervening. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 6(1), 33–39. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v6i1.103>

Dhyपालonika, M. R. (2018). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Pada Industri Perbankan*. 66.

Erianto, D., & Fardinal, F. (2024). The Effect of Income Smoothing and Dividend Policy on Tax Avoidance in Indonesia. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 8(02), 37–46. <https://doi.org/10.36348/sjef.2024.v08i02.003>

Estralita Trinawati, W. C. (2019). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Kebijakan Dividen Tunai Dimoderasi Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(3), 956. <https://doi.org/10.24912/jpa.v1i3.5600>

Faradilla, I. C., & Bhilawa, L. (2022). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan sales growth terhadap tax avoidance. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 34–44.

<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.2233>

Feny Destia, F. N. (2022). Perilaku Kepatuhan Pajak: Persepsi Calon Wajib Pajak Potensial. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8(1), 147–162.

Friskila, T., & Jaeni. (2022). The Effect of Profitability and Leverage on Tax Avoidance with Corporate Social Responsibility (CSR) as a Mediator Variable. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(2), 201–224.
<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>

Gunarianto, G. (2023). Analisis Nilai Perusahaan: Penghindaran Pajak Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, 6(1), 130. <https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5314>

Handayani, R. (2018). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1), 72–84.
<https://doi.org/10.28932/jam.v10i1.930>

Hardianti, D. C. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1641–1648. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1520>

Hartono, J. (2013). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* (7th ed.).

BPFE_YOGYAKARTA.

Haskar, E. (2020). Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam. *Menara Ilmu*, 14(2), 28–38.

Hendayana, Y., Arief Ramdhany, M., Pranowo, A. S., Abdul Halim Rachmat, R., & Herdiana, E. (2024). Exploring impact of profitability, leverage and capital intensity on avoidance of tax, moderated by size of firm in LQ45 companies. *Cogent Business and Management*, 11(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062>

Herawati, A. W., & Jaeni. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dengan Sales Growth Sebagai Pemoderasi. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4).
<https://www.kompasiana.com>

Hermawan, S., Sudradjat, S., & Amyar, F. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 359–372.
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.873>

Irawan, Y., Sularso, H., & Farida, Y. N. (2017). Analisis Atas Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Di Indonesia. *SAR (Soedirman Accounting Review) : Journal of Accounting and Business*, 2(2), 114.
<https://doi.org/10.20884/1.sar.2017.2.2.591>

- Istiqfarosita, M., & Abdani, F. (2022). English Political Connections and Thin Capitalization on Tax Avoidance During The Covid-19 Pandemic. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1238. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i05.p10>
- Kuswanto, R. (2023). Tax Avoidance and Dividend Policy: Evidence from Indonesian State-Owned Enterprises. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 10(2), 199–212. <https://doi.org/10.24815/jdab.v10i2.30037>
- Le, V. H., Vu, T. A. T., & Nguyen, M. H. (2022). Tax Planning and Firm Value: the Case of Companies With Different State Ownership in Vietnam. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 9(2), 333–343. <https://doi.org/10.15549/jeecar.v9i2.700>
- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Periode Tahun 2013–2017. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 301. <https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4174>
- Madjid, S., & Akbar, N. M. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2017-2021). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2966–2979.
- Maduma, T., & Naibaho, E. A. B. (2022). Pengaruh Tax Avoidance dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Moderasi.

- Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(5), 1181–1193.
<https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i5.1077>
- Mailia, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 506–515. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Mardiana, I. A., & Wuryani, E. (2019). Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan Akunesa : Jurnal Akuntansi Unesa. *AKUNESA : Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(1), 20–32.
- Marlina, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Pundi*, 2(2), 151–168. <https://doi.org/10.31575/jp.v2i2.82>
- Maryanti, T., & Ayem, S. (2022). Pengaruh Tax Avoidance Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 1152–1166. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1077>
- Meidiawati, K. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(2), 1–16.
- Mery, K. N. (2017). Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-

2014. *JOM Fekon*, 4(1), 2000–2014.
- Moeljono. (2023). Keputusan Keuangan Memoderasi Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(1), 1. <https://doi.org/10.30659/ekobis.24.1.1-13>
- Morgan, J. (2016). *Corporation Tax As A Problem Of MNC Organizational Circuits: The Case For Unitary Taxation*. 4(June), 2016.
- Nawang Sari, A. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure dan Profitability Terhadap Tax Avoidance di Jakarta Islamic Index (JII) Pada Tahun 2017-2020. *Journal of Accounting Science*, 6(2). <https://doi.org/10.21070/jas.v6i2.1614>
- Neliwati. (2018). Metodologi Penelitian Kuantitatif (Kajian Teori Dan Praktek). In *CV. Widya Puspita* (Issue 57). [http://repository.uinsu.ac.id/8959/1/BUKU METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/8959/1/BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUANTITATIF.pdf)
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Nibras, J. M., & Hadinata, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance.

Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan, 13(2), 165–178.

Nurdin, F., & Abdani, F. (2020). The effect of Profitability and Stock Split on Stock Return. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 52. <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.27721>

Nurhasan, Y. (2023). Pengaruh Efisiensi, Profitabilitas Dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Sektor Perbankan Periode Tahun 2017 - 2021). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(2), 308–316. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i2.654>

Oktaviani, D. (2019). Peran Kepemilikan Institusional Dalam Memoderasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Akuntansi Dewantara*, 3(2), 169–178. <https://doi.org/10.26460/ad.v3i2.5285>

Ozieranski, P., Martinon, L., Jachiet, P. A., & Mulinari, S. (2022). Tip of the Iceberg? Country-and Company-Level Analysis of Drug Company Payments for Research and Development in Europe. *International Journal of Health Policy and Management*, 11(12), 2842–2859. <https://doi.org/10.34172/ijhpm.2022.6575>

Prasatya, R. E., Mulyadi, J., & Suyanto, S. (2020). Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 153–162. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1535>

Prasetyo, I. B. A. P. (2018). The Influence of Managerial Ownership, Institutional

- Ownership, and the Proportion of Independent Commissioners on Profit Management. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 1(2), 1–8.
- Prayogo, M. D., & Desmiza, D. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Return on Asset Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Index Tahun 2018-2022. *Efektor*, 11(1), 53–65.
- Putri, A. A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 87–104.
<https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>
- Putri, A. A., Wijaya, R. A., & Dewi, R. C. (2020). Tax Avoidance Melalui Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi : Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v5i1.93>
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1–11.
<https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- Rachman, W. A. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2022. *Universitas*

Gunadarma, Windy@staff.Gunadarma.Ac.Id, 17, 96–107.

Rahmadini, I., & Ariani, N. E. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Perencanaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(1), 131–143.

Rahmawati, E., Nurlaela, S., & Samrotun, Y. C. (2021). Determinasi Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 158. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.206>

Riskatari, N. K. R., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Profitabilitas , Leverage dan Ukuran Perusahaan pada Tax Avoidance Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Indonesia Email : riskatarinew16@gmail.com Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Indonesia The Effect of Profitabilit. *E-Jurnal Akuntansi*, 30, 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i04.p07> menyatakan

Ristanti, L. (2022). Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Kualitas Audit Dan Penghindaran Pajak: Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 50–62. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i1.22>

Rosandi, A. D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(1), 19.

<https://doi.org/10.35906/jurakun.v8i1.961>

Rustiarini, N. W., & Sudiartana, I. M. (2021). Board Political Connection and Tax Avoidance: Ownership Structure as A Moderating Variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 128–144. <https://doi.org/10.24815/jdab.v8i2.20760>

Saputra, P. (2023). Efek Moderasi Kebijakan Dividen pada Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(1), 22–36. <https://doi.org/10.55587/jla.v3i1.89>

Saputro, S. U. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Terhadap Rax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(01), 1–23.

Saragih, M. R., & Rusdi, R. (2022). Perngaruh Tax Avoidance Dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2018). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(4), 1111–1120. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i4.587>

Sari, O., Nurlaela, S., & Titisari, K. (2022). Return on Assets (ROA), Leverage, And Firm Size on Tax Avoidance (Registered Banking Companies on IDX 2014-2018). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 7(1), 98–103. <https://doi.org/10.32486/aksi.v7i1.252>

- Schaltegger, S., Christ, K. L., Wenzig, J., & Burritt, R. L. (2022). Corporate sustainability management accounting and multi-level links for sustainability – A systematic review. *International Journal of Management Reviews*, 24(4), 480–500. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12288>
- Selvy, & Esra, M. A. (2022). Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Hutang Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks LQ 45 Periode 2015 -2019. *Jesyra*, 5(2), 1252–1263. <https://doi.org/10.36778/jesyra.v5i2.734>
- Setiawan, A. F., & Suwaidi, R. A. (2022). Pengaruh Rasio Likuiditas, Aktivitas, dan Leverage Terhadap Profitabilitas dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 7(3), 750. <https://doi.org/10.28926/briliant.v7i3.1035>
- Setyawati, W. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur Modal, Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai Moderasi (studi empiris pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2015). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(2), 214–240.
- Sholikhah, M. 'Ainish, & Nurdin, F. (2022). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study on Trade, Service and Investment Company Listed on the Indonesia Stock Exchange Period of 2016 - 2020. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 203–213.

<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1715>

- Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *Oxford Journals*, 87(3), 355–374.
- Sudiarto, E., Amin, A., & Kinanti Sabaneno, D. (2022). Analisis Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 15(2), 309–318. <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v15i2.768>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Issue January).
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian KOMUNIKASI. In *Alfabeta* (Vol. 1). <https://doi.org/10.14710/jdep.1.3.35-45>
- Suryatna, I. K. D. (2023). The Effect of Institutional Ownership, Sales Growth, Firm Size on Tax Avoidance with Corporate Social Responsibility as a Moderating Variable. *International Journal of Social Science and Business*, 7(3), 618–629. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i3.55757>
- Sutomo, H., & Djaddang, S. (2017). Determinan Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 4(01), 32–46. <https://doi.org/10.35838/jrap.v4i01.148>
- Suyanto, Apriliyana, S., Alfiani, H., & Putri, F. (2021). Harga Transfer, Kesulitan Keuangan, Manajemen Laba, dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *Akuntansi Dewantara*, 6(3), 88–101.

<https://doi.org/10.30738/ad.v6i3.13327>

Taleb, L. (2019). Politique de dividendes, théorie de signalisation : Une revue de la littérature Dividend (Policy, Signaling Theory: A Literature Review). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3314627>

Wahyuni, F. I., & Andriani, S. (2024). *Does A Reduction In Tax Rates Influence Tax Aggressiveness? An Analysis With Additional Factors*. 6(2).

Winarno, W. W. (2017). Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan EViews (Edisi 5). *Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan EViews (Edisi 5)*, 102(1), 53–71. <https://www.belbuk.com/analisis-ekonometrika-dan-statistika-dengan-eviews-edisi-4-p-10178.html>

Windarti, A., & Sina, I. (2017). Book Tax Difference dan Struktur Kepemilikan sebagai Upaya Penghindaran Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i1.1903>

Wirianto, D., Yazid, H., & Yulianto, A. S. (2021). Efek Moderasi Kebijakan Dividen dan Kepemilikan Institusional pada Hubungan Tax Avoidance dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(5), 1715–1738.

Wulandari, W. D., Assoba, S., & Uzliawati, L. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 7(4), 2931–2940. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1636>

Zahroh, F., & Harkaneri, H. (2020). Perbandingan Hukum Pajak Dan Zakat Menurut Syariah Dan Negara. *J-MACC : Journal of Management and Accounting*, 3(1), 38–50. <https://doi.org/10.52166/j-macc.v3i1.1855>

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Kode	Tahun	Profitabilitas	Ukuran Perusahaan	Kepemilikan Institusional	Leverage	Tax Avoidance
			X1	X2	X3	X4	Y
1	BBRI	2019	0,1646	34,8871	0,9891	5,7858	0,0063
2		2020	0,0933	35,0151	0,9814	7,0539	0,0050
3		2021	0,1065	35,0564	0,9741	4,7511	0,0061
4		2022	0,1687	35,1624	0,9801	5,1492	0,0071
5		2023	0,1899	35,2143	0,9801	5,2091	0,0081
6	BBNI	2019	0,1455	34,3711	0,9797	5,7646	0,0046
7		2020	0,0355	34,4237	0,9322	6,8969	0,0020
8		2021	0,0918	34,5030	0,9477	6,6260	0,0016
9		2022	0,1041	34,5682	0,9580	6,3456	0,0041
10		2023	0,1393	34,6219	0,9572	6,0229	0,0042
11	BMRI	2019	0,1658	34,8151	0,9906	5,3064	0,0061
12		2020	0,1056	34,9718	0,9844	6,9566	0,0039
13		2021	0,1262	35,0844	0,9871	6,7691	0,0045
14		2022	0,1632	35,2282	0,9887	6,8992	0,0057
15		2023	0,1915	35,3154	0,9860	6,5626	0,0067
16	BBTN	2019	0,0234	33,3733	0,9468	12,0800	0,0006
17		2020	0,1177	33,5205	0,8962	17,0714	0,0019
18		2021	0,0663	33,5496	0,9090	16,3716	0,0017
19		2022	0,0766	33,6278	0,8972	14,5214	0,0021
20		2023	0,1263	33,7150	0,6571	13,3951	0,0020
21	SMGR	2019	0,0683	32,0106	0,9929	1,3548	0,0103
22		2020	0,0680	31,9878	0,9921	1,1879	0,0104
23		2021	0,0523	31,9684	0,9590	0,9230	0,0181
24		2022	0,0582	32,0494	0,9590	0,7562	0,0096
25		2023	0,0454	32,0355	0,9591	0,7117	0,0123
26	ANTM	2019	0,0107	31,0387	0,8834	0,6652	0,0163
27		2020	0,0604	31,0883	0,8542	0,6665	0,0155
28		2021	0,0893	31,1250	0,8733	0,5797	0,0359
29		2022	0,1611	31,1467	0,8662	0,4186	0,0414
30		2023	0,0988	31,3888	0,8626	0,3750	0,0181
31	WIKA	2019	0,1480	29,9668	0,5550	1,9466	0,0112
32		2020	0,0371	29,7721	0,7844	1,5096	0,0009
33		2021	0,0245	29,8202	0,7564	1,5895	0,0003
34		2022	0,0448	29,8768	0,7503	1,5970	0,0083
35		2023	0,0097	29,6633	0,7415	1,1046	0,0030

36	TLKM	2019	0,1418	33,1402	0,9940	1,1061	0,0418
37		2020	0,1455	33,0301	0,9751	0,8298	0,0416
38		2021	0,1841	33,2557	0,9900	0,9064	0,0351
39		2022	0,1505	33,2485	0,9861	0,8437	0,0315
40		2023	0,1474	33,2906	0,9858	0,8334	0,0299
41	ELSA	2019	0,0966	29,5487	0,8100	0,9026	0,0203
42		2020	0,0676	29,6543	0,7130	1,0216	0,0174
43		2021	0,0296	29,6099	0,6100	0,9149	0,0168
44		2022	0,0956	29,8099	0,6660	1,1461	0,0123
45		2023	0,1105	29,8929	0,6110	1,1742	0,0149
46	PTBA	2019	0,2095	30,8929	0,9452	0,4166	0,0542
47		2020	0,1316	30,8114	0,9041	0,4202	0,0342
48		2021	0,3071	31,2180	0,8918	0,4894	0,0643
49		2022	0,4342	31,4456	0,8939	0,5687	0,0755
50		2023	0,2457	31,2885	0,8624	0,7977	0,0480

No.	Kode	Tahun	Kebijakan Dividen	P*DPR	UP*DPR	KI*DPR	L*DPR
			Z	X1Z	X2Z	X3Z	X4Z
1	BBRI	2019	0,5993	0,0987	20,9072	0,5927	3,4673
2		2020	0,6498	0,0606	22,7529	0,6377	4,5836
3		2021	0,8586	0,0914	30,0991	0,8364	4,0793
4		2022	0,8461	0,1427	29,7497	0,8292	4,3566
5		2023	0,7962	0,1512	28,0364	0,7803	4,1473
6	BBNI	2019	0,2480	0,0361	8,5240	0,2430	1,4296
7		2020	0,0529	0,0019	1,8203	0,0493	0,3647
8		2021	0,2482	0,0228	8,5640	0,2352	1,6446
9		2022	0,3963	0,0413	13,7003	0,3797	2,5149
10		2023	0,4953	0,0690	17,1496	0,4741	2,9834
11	BMRI	2019	0,5795	0,0961	20,1744	0,5740	3,0749
12		2020	0,5583	0,0590	19,5237	0,5496	3,8837
13		2021	0,5505	0,0695	19,3122	0,5434	3,7261
14		2022	0,5495	0,0897	19,3587	0,5433	3,7913
15		2023	0,5501	0,1054	19,4279	0,5424	3,6103
16	BBTN	2019	0,1000	0,0023	3,3374	0,0947	1,2080
17		2020	0,0131	0,0015	0,4378	0,0117	0,2230
18		2021	0,1000	0,0066	3,3550	0,0909	1,6372
19		2022	0,2000	0,0153	6,7256	0,1794	2,9043
20		2023	0,2000	0,0253	6,7430	0,1314	2,6790

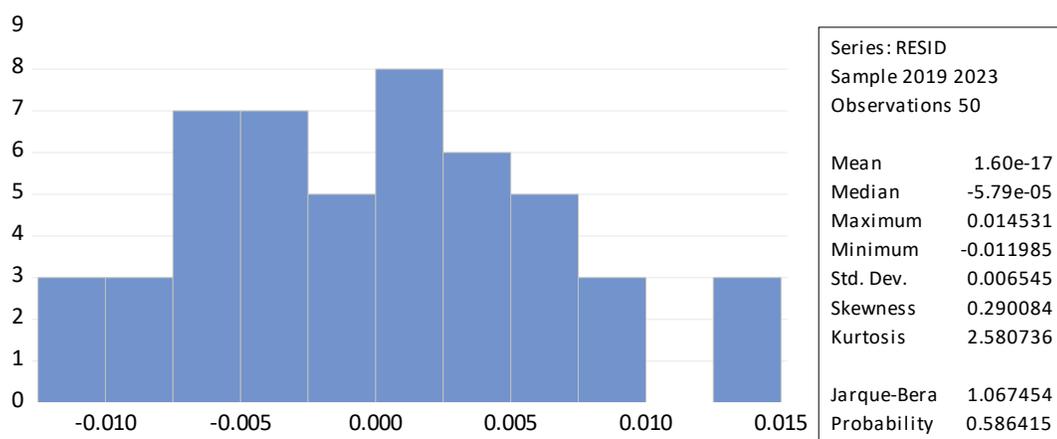
21	SMGR	2019	0,1009	0,0069	3,2293	0,1002	0,1367
21		2020	0,4176	0,0284	13,3596	0,4143	0,4961
23		2021	0,4918	0,0257	15,7214	0,4716	0,4539
24		2022	0,6624	0,0385	21,2294	0,6352	0,5009
25		2023	0,7392	0,0335	23,6803	0,7090	0,5261
26	ANTM	2019	0,3500	0,0037	10,8635	0,3092	0,2328
27		2020	0,3500	0,0211	10,8809	0,2990	0,2333
28		2021	0,5000	0,0447	15,5625	0,4367	0,2898
29		2022	0,5000	0,0806	15,5733	0,4331	0,2093
30		2023	1,0000	0,0988	31,3887	0,8626	0,3750
31	WIKI	2019	0,2508	0,0371	7,5151	0,1392	0,4882
32		2020	0,2081	0,0077	6,1948	0,1632	0,3141
33		2021	0,2033	0,0050	6,0639	0,1538	0,3232
34		2022	0,1911	0,0086	5,7083	0,1434	0,3051
35		2023	0,3474	0,0034	10,3063	0,2576	0,3838
36	TLKM	2019	0,5531	0,0784	18,3309	0,5498	0,6118
37		2020	0,4222	0,0615	13,9459	0,4117	0,3504
38		2021	0,4376	0,0806	14,5530	0,4332	0,3966
39		2022	0,5998	0,0903	19,9431	0,5915	0,5061
40		2023	0,5490	0,0809	18,2774	0,5412	0,4576
41	ELSA	2019	0,2500	0,0242	7,3872	0,2025	0,2257
42		2020	0,3000	0,0203	8,8962	0,2139	0,3065
43		2021	0,4995	0,0148	14,7908	0,3047	0,4570
44		2022	0,5000	0,0478	14,9052	0,3330	0,5731
45		2023	0,3999	0,0442	11,9553	0,2444	0,4696
46	PTBA	2019	0,9037	0,1893	27,9171	0,8542	0,3765
47		2020	0,3469	0,0456	10,6895	0,3137	0,1458
48		2021	0,9841	0,3022	30,7217	0,8776	0,4816
49		2022	0,9834	0,4270	30,9244	0,8791	0,5592
50		2023	0,7278	0,1788	22,7703	0,6276	0,5806

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d,f,	Prob,
Cross-section F	9,578520	(9,35)	0,0000
Cross-section Chi-square	62,107458	9	0,0000

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq, Statistic	Chi-Sq, d,f,	Prob,
Cross-section random	10,455109	5	0,0633

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Null hypotheses: No effects			
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives			
	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	15,33095	0,303654	15,63460
	(0,0001)	(0,5816)	(0,0001)
Honda	3,915475	-0,551048	2,379010
	(0,0000)	(0,7092)	(0,0087)
King-Wu	3,915475	-0,551048	1,713415

	(0,0000)	(0,7092)	(0,0433)
Standardized Honda	5,944827	-0,304511	0,305869
	(0,0000)	(0,6196)	(0,3799)
Standardized King-Wu	5,944827	-0,304511	-0,399855
	(0,0000)	(0,6196)	(0,6554)
Gourieroux, et al,	--	--	15,33095
			(0,0002)



	X1	X2	X3	X4
X1	1,000000	0,203552	0,217292	-0,101811
X2	0,203552	1,000000	0,721605	0,590606
X3	0,217292	0,721605	1,000000	0,154264
X4	-0,101811	0,590606	0,154264	1,000000

	X1	X2	X3	X4	Y	Z
Mean	0,117511	32,52200	0,891010	3,865915	0,016681	0,467226
Median	0,106039	32,53975	0,946000	1,271330	0,009986	0,493559
Maximum	0,434171	35,31545	0,994000	17,07140	0,075462	0,999999
Minimum	0,009737	29,54868	0,555000	0,374953	0,000312	0,013060
Std, Dev,	0,077167	1,967651	0,118212	4,408521	0,017832	0,253518
Skewness	1,582549	-0,069865	-1,309188	1,519929	1,492781	0,328150
Kurtosis	7,333290	1,593592	3,698609	4,612560	4,603198	2,476089
Jarque-Bera	59,99010	4,161472	15,29988	24,66892	23,92464	1,469193
Probability	0,000000	0,124838	0,000476	0,000004	0,000006	0,479699
Sum	5,875550	1626,100	44,55050	193,2957	0,834070	23,36131
Sum Sq, Dev,	0,291779	189,7108	0,684734	952,3178	0,015582	3,149304
Observations	50	50	50	50	50	50

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 11/02/24 Time: 07:15				
Sample: 2019 2023				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 10				
Total panel (balanced) observations: 50				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std, Error	t-Statistic	Prob,
C	0,119696	0,042697	2,803414	0,0074
X1	0,123410	0,014661	8,417393	0,0000
X2	-0,004341	0,001478	-2,937463	0,0052
X3	0,030222	0,012914	2,340286	0,0238
X4	-0,000843	0,000545	-1,546631	0,1290
Effects Specification				
			S,D,	Rho
Cross-section random			0,006456	0,6362
Idiosyncratic random			0,004882	0,3638
Weighted Statistics				
Root MSE	0,004946	R-squared		0,630107
Mean dependent var	0,005344	Adjusted R-squared		0,597228
S,D, dependent var	0,008216	S,E, of regression		0,005214
Sum squared resid	0,001223	F-statistic		19,16422
Durbin-Watson stat	1,895279	Prob(F-statistic)		0,000000
Unweighted Statistics				
R-squared	0,762721	Mean dependent var		0,016681
Sum squared resid	0,003697	Durbin-Watson stat		0,627107

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 11/02/24 Time: 07:18				
Sample: 2019 2023				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 10				
Total panel (balanced) observations: 50				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std, Error	t-Statistic	Prob,
C	0,005837	0,035618	0,163869	0,8707
X1	0,146578	0,027771	5,278130	0,0000
X2	-0,000879	0,001435	-0,612453	0,5437
X3	0,027230	0,020926	1,301241	0,2006
X4	-0,000504	0,000332	-1,517428	0,1370
Z	0,164028	0,079920	2,052412	0,0467
X1Z	-0,003725	0,034030	-0,109462	0,9134
X2Z	-0,005663	0,003062	-1,849691	0,0718
X3Z	0,033870	0,050821	0,666453	0,5089
X4Z	-0,003276	0,001486	-2,204223	0,0333
Effects Specification				
			S,D,	Rho
Cross-section random			0,000000	0,0000
Idiosyncratic random			0,004497	1,0000
Weighted Statistics				
Root MSE	0,006479	R-squared		0,865311
Mean dependent var	0,016681	Adjusted R-squared		0,835006
S,D, dependent var	0,017832	S,E, of regression		0,007243
Sum squared resid	0,002099	F-statistic		28,55341

Durbin-Watson stat	1,362132	Prob(F-statistic)	0,000000
Unweighted Statistics			
R-squared	0,865311	Mean dependent var	0,016681
Sum squared resid	0,002099	Durbin-Watson stat	1,362132

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Tri Ananda Rizky
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 29 Desember 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Karang RT 03 RW 09, Wonosari, Gempol, Pasuruan
Nomor HP : 089530169487
Email : anandarzky415@gmail.com

Pendidikan Formal

2011-2016 : SDN Kepulungan 1
2016-2018 : SMP Negeri 2 Gempol
2018-2020 : SMA Negeri 1 Pandaan
2020-Sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi
2. Anggota Lab Statistik Fakultas Ekonomi UIN Malang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 210502110037
 Nama : Tri Ananda Rizky
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Akuntansi
 Dosen Pembimbing : Fatmawati Zahroh, M.S.A
 Judul Skripsi : Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan BUMN *Go Public* di Indonesia yang Dimoderasi oleh Kebijakan Dividen

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	6 September 2024	Bimbingan Judul Skripsi	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
2	13 September 2024	Bimbingan Bab 1	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
3	20 September 2024	Bimbingan Bab 2 dan 3	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
4	1 November 2024	Bimbingan Revisi Proposal	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
5	4 November 2024	Bimbingan Templat Jurnal	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
6	11 November 2024	Bimbingan Revisi Artikel	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
7	12 Desember 2024	Bimbingan Bab 4	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
8	13 Desember 2024	Bimbingan Bab 5	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi

Malang, 13 Desember 2024

Dosen Pembimbing



Fatmawati Zahroh, M.S.A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
 NIP : 198409302023211006
 Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Tri Ananda Rizky
 NIM : 210502110037
 Konsentrasi : Perpajakan
 Judul Skripsi : **Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan BUMN Go Public di Indonesia yang Dimoderasi oleh Kebijakan Dividen**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
25%	23%	15%	10%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Desember 2024
 UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional,
dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan BUMN *Go*
Public di Indonesia yang Dimoderasi oleh Kebijakan Dividen

Oleh
TRI ANANDA RIZKY

NIM: 210502110037

Telah diseminarkan Pada 18 Oktober 2024

Susunan Dewan Penguji:

- 1 Penguji I
Sri Andriani, M.Si
NIP. 197503132009122001
- 2 Penguji II
Fajar Nurdin, M.Ak
NIP. 198310052019031006
- 3 Penguji III
Fatmawati Zahroh, M.S.A
NIP. 198602282019032010

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi:

Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D



NIP. 197606172008012020